EDISI REVISI 2017

Buku Guru

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA/
SMK/MAK

KELAS

X

Disklaimer: *Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
viii, 320 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X
ISBN 978-602-427-094-0 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-095-7 (jilid 1)

1. Pendidikan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

600

Penulis : Tolib dan Nuryadi.

Penelaah : Dadang Sundawa, Nasiwan, Kokom Komalasari dan Ekram Pawiroputra.

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-477-0 (Jilid 1)
Cetakan Ke-2, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-3, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 12 pt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga Buku Teks dan Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X untuk SMA/SMK/MA/MAK dapat terselesaikan. Buku Teks dan Buku Guru ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dan terbitan kali ini merupakan edisi revisi pertama dari penyusunan buku sebelumnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA/SMK/MA/MAK adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pengembangan peserta didik agar mampu :

1. Berpikir secara rasional, kritis, kreatif, dan etis serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang independen, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berkomitmen dan proaktif dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai karakter bangsa Indonesia
4. Berkembang secara positif dan demokratis dalam mengembangkan konstitusi yang sehat dan dinamis serta memiliki keyakinan, kemauan, kesetiaan, dan kebanggaan serta keteguhan sebagai bangsa Indonesia.

Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, buku ini berbasis Aktivitas, dimana peserta didik diajak berani untuk mencari sumber belajar lain yang relevan dan tersedia serta terbentang luas disekitarnya, sehingga peserta didik menjadi bahagian dalam kegiatan pembelajaran

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, buku teks ini dilengkapi dengan buku guru, sebagai panduan pembelajaran yang berisi alternatif-alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru di kelas. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dan inovasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan alam dan lingkungan sosial peserta didik. Untuk itu peran guru dalam rangka meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik, masukan dan saran yang membangun diharapkan bagi perbaikan dan penyempurnaan buku. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerbitkan buku teks dan buku guru ini. Semoga buku ini dapat memberikan setetes ilmu bagi bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

Petunjuk Umum

Bagian 1

A. Maksud dan Tujuan Buku Guru

Secara umum, penyusunan buku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimaksudkan untuk memfasilitasi para guru PPKn dalam melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Membangun persepsi dan sikap positif terhadap mata pelajaran PPKn sesuai dengan ide, regulasi, karakteristik psikologis-pedagogis, dan fungsinya dalam konteks sistem pendidikan nasional.
2. Memahami secara utuh dan menyeluruh karakteristik PPKn Kurikulum 2013 sebagai landasan membangun pola sikap dan pola perilaku profesional sebagai guru PPKn.
3. Memfasilitasi tumbuhnya kesejawatan (kolegialisme) guru PPKn untuk mewujudkan pembelajaran PPKn dan pengembangan budaya kewarganegaraan di lingkungan satuan pendidikan dan lingkungan sosial-kultural peserta didik.
4. Mengembangkan diri sebagai guru PPKn yang profesional dan dinamis dalam menyikapi dan memecahkan masalah-masalah praktis terkait visi dan misi PPKn di lingkungan satuan pendidikan.

Secara khusus, *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman guru PPKn.
   a. Latar belakang mata pelajaran PPKn.
   b. Misi mata pelajaran PPKn.
   c. Substansi mata pelajaran PPKn.
   d. Karakteristik mata pelajaran PPKn.
   e. Strategi pembelajaran saintifik, dan.
   f. Penilaian otentik mata pelajaran PPKn.
2. Meningkatkan kemampuan guru PPKn.
   a. Beradaptasi dengan tuntutan PPKn.
   b. Melaksanakan sistem pembelajaran dan penilaian PPKn secara tepat.
   c. Mengoptimalkan pemanfaatan media dan sumber belajar PPKn.
   d. Memelihara dan meningkatkan profesionalitas sebagai guru PPKn.
   e. Membangun manajemen yang mendukung sistem pembelajaran dan penilaian PPKn secara tepat.

3. Menjadi acuan guru PPKn.
    a. Merancang pembelajaran dari KI dan KD ke dalam bahan ajar, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran secara lebih inovatif, kreatif, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, karakteristik dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik;
    b. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar lebih kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi sosial budaya daerah.
    c. Merancang dan melaksanakan penilaian kompetensi peserta didik (aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan) secara utuh sesuai dengan prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.

B. Petunjuk Penggunaan Buku Guru

Buku ini merupakan pedoman guru dalam mengelola program pembelajaran terutama dalam memfasilitasi peserta didik untuk mendalami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana terdapat dalam buku siswa. Buku ini merupakan petunjuk teknis untuk mengoperasionalkan materi pembelajaran yang terdapat dalam buku siswa. Oleh karena itu, sudah semestinya guru membaca dan mengimplementasikannya dalam setiap melaksanakan proses pembelajaran.

Secara garis besar buku guru ini terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian I Petunjuk Umum dan Bagian II Petunjuk Khusus Pembelajaran PPKn. Secara lebih terinci, ruang lingkup *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* adalah sebagai berikut.

1. Bagian I Petunjuk Umum, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan buku guru, petunjuk penggunaan buku guru, KI dan KD mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, karakteristik mata pelajaran PPKN dan strategi pembelajaran PPKn.
2. Bagian II Petunjuk Khusus Pembelajaran PPKn, menguraikan petunjuk pembelajaran tiap komptensi dasar.

C. KI dan KD Mata Pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X memiliki 4 kompetensi inti dan 28 kompetensi dasar. Dalam proses pembelajarannya KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan) disajikan melalui pembelajaran langsung *(direct teaching)*. Sedangkan KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung *(indirect teaching)*, melalui keteladanan, ekosistem pendidikan, dan proses pembelajaran pengetahuan, dan keterampilan. Guru mengembangkan sikap sosial dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Evaluasi terhadap sikap

spiritual dan sikap sosial dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan berfungsi sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Proses pembelajaran KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 (sikap sosial) dalam mata pelajaran PPKn ditumbuhkan sebagai akibat dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan), contohnya mempelajari Wawasan Nusantara menumbuhkan sikap peduli. Juga sebagai dampak pengiring *(mutual effect)* dari proses pembelajaran yang dirancang sehingga menumbuhkan sikap dalam KI-1 dan KI-2, contohnya proses pembelajaran dengan diskusi kelompok menumbuhkan sikap kerja sama dan toleransi.

Berikut penyebaran kompetensi inti dan kompetensi dasar Mata pelajaran PPKn Kelas X secara lengkap.

Tabel 1
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKN kelas X

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)	**Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)**
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Kompetensi Dasar	**Kompetensi Dasar**
1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.2. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.	2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.
1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.
1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.	2.5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
1.6. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

1.7. Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	2.7. Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)	**Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)**
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar	**Kompetensi Dasar**
3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara.
3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4.7. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kompetensi Inti kelas X dijabarkan ke dalam 28 Kompetensi Dasar yang akan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran satu tahun (dua semester) yang terurai dalam 32 minggu. Agar kegiatan pembelajaran tidak terasa terlalu panjang maka 32 minggu itu dibagi menjadi dua semester, semester pertama dan semester kedua, masing-masing 16 minggu. Dengan demikian, waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran wajib di SMA/MA dan SMK/MAK disediakan waktu 2 x 45 menit x 32 minggu.

1. Kaitan Antara KI, KD, dan Pembelajaran

Untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pihak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan

buku teks pelajaran mata pelajaran PPKn Kelas X. Berdasarkan jumlah KD terutama yang terkait dengan penjabaran KI-3, ruang lingkup materi pelajaran yang terdapat dalam buku teks *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X* terdiri 7 (tujuh) bab sebagai berikut.

Bab 1: Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Bab 2: Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Bab 3: Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bab 4: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bab 5: Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Bab 6: Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Bab 7: Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan jumlah materi dan alokasi waktu yang tersedia, maka penggunaan buku teks pelajaran *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X* dapat dibuat skenario pembelajaran sebagai berikut.

Tabel 2
Skenario Pembelajaran PPKn Kelas X

<table>
<tr><th rowspan="3">BAB</th><th colspan="3">SEMSTER 1 (GANJIL)</th><th rowspan="3">KETERANGAN</th></tr>
<tr><th colspan="3">Jumlah Pertemuan / Minggu</th></tr>
<tr><th>4 X 2JP</th><th>4 X 2JP</th><th>4 X 2JP</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">- Ulangan Harian dilaksanakan setelah terselesaikannya 1 (satu) bab atau Kompetensi Dasar yang alokasi waktu dan teknik pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing.

- Setelah terselesaikannya Bab 1 dan Bab 2, dilakukan ulangan tengah semester.

- Adapun, ulangan akhir semester dilakukan setelah terselesaikannya Bab 4.</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

BAB	SEMSTER 2 (GENAP)			KETERANGAN
	JUMLAH PERTEMUAN / MINGGU			
	4 X 2JP	4 X 2JP	4 X 2JP	
5				- Setelah terselesaikannya Bab 5 dan Bab 6 dilakukan ulangan tengah semester. - Adapun, ulangan akhir semester dilakukan setelah terselesaikannya Bab 7.
6				
7				

2. Kaitan Antara KI, KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Penguasaan Kompetensi Dasar dicapai melalui proses pembelajaran dan pengembangan pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap KD, terutama KD-KD penjabaran dari KI-3 dan KI-4. Kompetensi Dasar pada KI-3 dan KI-4 untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3
Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada KI-1

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1.1.1. Membangun nilai-nilai toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 1.1.2. Membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
	1.2. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.	1.2.1. Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 1.2.2. Membangun nilai-nilai kerja sama secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
	1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1. Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	1.4.1. Membangun nilai-nilai pro aktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		1.4.2. Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UU Dasar Negara Republik Indonesia Thn 1945.
	1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.	1.5.1. Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika. 1.5.2. Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.
	1.6. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1.6.1. Membangun nilai-nilai kerja sama yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika. 1.6.2. Membangun nilai-nilai gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesainnya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai *BhinnekaTunggal Ika.*
	1.7. Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	1.7.1. Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.7.2. Membangun nilai-nilai peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4

Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada KI-2

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.1.1. Membangun nilai-nilai toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 2.1.2. Membangun nilai-nilai Kejujuran dalam kerangka praktik penyenggaraan pemerintah Negara.
	2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	2.2.1. Membangun nilai-nilai mengharagai yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 2.2.2. Membangun nilai-nilai kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
	2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.	2.3.1. Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
	2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.	2.4.1. Membangun nilai-nilai pro aktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.4.2. Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	2.5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.5.1. Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika. 2.5.2. Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.
	2.6. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6.1. Membangun nilai-nilai Kerjasama terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		2.6.2. Membangun nilai-nilai gotong royong terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.
	2.7. Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2.7.1. Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.7.2. Membangun nilai-nilai peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 5
Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada KI-3

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	3.1.1. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen. 3.1.3. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
	3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	3.2.1. Mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.2.2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 3.2.3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 3.2.4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia.
	3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.3.1. Mengidentifikasi suprastruktur Sistem Politik Indonesia. 3.3.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945. 3.3.3. Menganalisis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 3.3.4. Menunjukkan partisipasi warga negara dalam Sistem Politik RI.
	3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.4.1. Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.4.2. Mengidentifikasi kedudukan dan peran Pemerintah Pusat. 3.4.3. Mengidentifikasi kedudukan dan peran Pemerintah Daerah.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		3.4.4. Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.
	3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	3.5.1. Mengidentifikasi kebhinnekaan bangsa Indonesia. 3.5.2. Menganalisis konsep integrasi nasional. 3.5.3. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 3.5.4. Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. 3.5.5. Menunjukkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
	3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	3.6.1. Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional. 3.6.2. Mengidentifikasi ancaman di bidang Ipoleksosbudhankam. 3.6.3. Menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional.
	3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	3.7.1. Menganalisis Wawasan Nusantara. 3.7.2. Mengidentifikasi fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		3.7.3. Mengidentifikasi aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. 3.7.4. Menunjukkan peran serta warga negara mendukung implementasi Wawasan Kebangsaan.

Tabel 6
Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada KI-4

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara.	4.1.1. Menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 4.1.2. Mengomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.
	4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2.1. Menyajikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		4.2.2. Mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.
	4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3.1. Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.2. Mengomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4.1. Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.4.2. Mengomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.5.1. Menyajikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
		4.5.2. Mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.
	4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.	4.6.1. Menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam. 4.6.2. Mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam.
	4.7. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4.7.1. Menyajikan hasil analisis tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.7.2. Mengomunikasikan hasil analisis pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

1. Rasional

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki *rasa kebangsaan* dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.

Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar

yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi pendidikan kewarganegaraan (sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) sebagaimana termaktub dalam silabus menitik-beratkan pada pembentukan karakter warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta demokratis dan bertanggung jawab. Hal itu juga termaktub dalam Pasal 31 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan secara utuh menjadi karakter diorganisasikan melalui pengembangan dampak instruksional, dampak pengiring, dan budaya kewarganegaraan dalam lingkungan belajar yang menarik, menyenangkan dan membelajarkan sepanjang hayat. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran dan lingkungan belajar di kelas, di luar kelas, dan dalam masyarakat serta jaringan *(virtual).*

2. Hakikat Mata Pelajaran PPKn

Dalam tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Di Indonesia, arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak boleh juga keluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini yang menyebabkan secara terminologi untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, secara umum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek sebagai berikut.

1. Kemelekwacanaan sebagai warga negara *(civic literacy)*, yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu.
2. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan *(civic engagement)*, yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara *(civic skill and participation)*, yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultural kewarganegaraan di lingkungannya.
4. Penalaran kewarganegaraan *(civic knowledge)*, yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggung jawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab *(civic participation and civic responsibility)*, yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. (Dokumen SKGK Depdiknas, 2004).

3. Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 K Ayat (2) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni:

a. Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan *(civic confidence, civic commitment, and civic responsibility)*.

b. Pengetahuan kewarganegaraan.
c. Keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan *(civic competence and civic responsibility).*

Secara khusus tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial.
b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Berpikir secara kritis, rasional, kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya.

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan bertumbuhkembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PPKn

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Dengan perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn adalah sebagai berikut.

a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut.

a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education di USA, citizenship education di UK, talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah*, education civicas* di Amerika Latin.
b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

Tabel 7
Ruang Lingkup Materi PPKn Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Kelas X
1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelas X
5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 6. Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 7. Arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X

1. Konsep dan Strategi Pembelajaran dalam Pembelajaran PPKn

Konsep dan strategi pembelajaran merupakan salah satu elemen perubahan pada Kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah menguraikan secara jelas konsep dan strategi pembelajaran sebagai implementasi Kurikulum 2013. Berikut disampaikan isi konsep dan strategi pembelajaran tersebut yang juga menjadi dasar strategi dan model umum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan.

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada gilirannya mereka diharapkan menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika,

logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman, tempat, dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari "diberi tahu" menjadi "aktif mencari tahu".

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus pembelajaran yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah,

dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Kurikulum 2013 semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah maupun dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya (KI-3 dan KI-4) dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

2. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

Pendekatan pembelajaran dalam Kurkulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific approach*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian *(discovery/inquiry learning)*. Untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning)*.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran, maka mata pelajaran PPKn menggunakan modus pembelajaran langsung *(direct instructional)* dan tidak langsung *(indirect instructional)*. Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran *(instructional effect)*. Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring *(nurturant effect)*. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2.

Dalam pembelajaran PPKn, pembelajaran langsung dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu di **dalam kelas** dan **di luar kelas.** Jika pembelajaran langsung yang disampaikan **di dalam kelas** maka pembuatan desain pembelajaran harus memerhatikan keterkaitan antara KD dan KI-3. Tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman pengetahuan secara faktual,

konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dalam hal ini, peserta didik akan memiliki wawasan pengetahuan yang luas melalui paparan materi yang difasilitasi oleh guru di dalam kelas.

Peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan yang lebih luas dengan mengalaminya secara langsung di lingkungan masyarakat. Untuk itu peserta didik difasilitasi untuk melibatkan diri dalam proses **pembelajaran secara langsung di luar kelas.** Untuk mendukung kegiatan tersebut, guru perlu mengembangkan desain pembelajaran yang mengaitkan antara KD dan KI-4. Tujuannya agar peserta didik dapat mengalami proses belajar melalui kegiatan: mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Dalam hal ini, peserta didik memperoleh pengetahuan secara langsung dari narasumber yang ada di masyarakat.

Pengembangan desain pembelajaran bertujuan juga untuk memfasilitasi **pembelajaran secara tidak langsung,** sehingga kerangka pembelajaran harus dikelola sedemikian rupa. Proses belajar yang tercipta dari keterkaitan KI-3 dan KI-4 dapat memberikan dampak pengiring *(nurturant effect)* tumbuhnya sikap spiritual yang dimaksud dalam KI-1 dan sikap sosial dalam KI-2. Penguasaan kompetensi KI-3 dan KI-4 serta dampak pengiring sebagaimana dimaksud dalam KI-1 dan KI-2, maka akan tercapai secara utuh kompetensi integrasi KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 (utuh menyeluruh).

Oleh karena PPKn merupakan mata pelajaran yang bermuatan nilai dan moral, dimana kandungan KI-3 dan KI-4 sudah bermuatan nilai dan moral dalam dimensi pengetahuan dan keterampilan, maka pembelajaran langsung KI-3 dan KI-4 secara otomatis akan menjadi dampak pengiring terhadap KI-1 dan KI-2.

Pendekatan pembelajaran PPKn memusatkan perhatian pada proses **pembangunan pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial** melalui **transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual** terhadap sumber nilai, instrumentasi dan praksis nilai dan moral yang bersumber dari empat konsensus kebangsaan. Untuk itu perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hal-hal sebagai berikut.

1) Meningkatkan rasa keingintahuan *(foster a sense of wonder)* terkait hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual.
2) Meningkatkan keterampilan mengamati *(encourage observation)* dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang bersifat kasat mata tetapi juga yang syarat makna.
3) Melakukan analisis *(push for analysis)* untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pemilikan karakter tertentu.
4) Berkomunikasi *(require communication),* baik yang bersifat intrapersonal (berkomunikasi dalam dirinya)/kontemplasi maupun interpersonal mengenai hal yang terpikirkan maupun yang bersifat metakognitif.

Karakteristik belajar dan pembelajaran tersebut di atas diwujudkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan *(saintific approach)*.

Penjelasan kelima langkah pembelajaran *scientific approach* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- **Mengamati**
  1. Setiap awal pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan mengamati. Kegiatan mengamati dapat berupa membaca, melihat, mendengar, dan menyimak. Pada kegiatan mengamati, misalnya mengamati film/gambar/foto/ilustrasi yang terdapat dalam buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X*. Kegiatan membaca, misalnya membaca teks yang ada di dalam buku teks pelajaran PPKn.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.1 Peserta didik membaca informasi dari media elektronik/internet.

  2. Peserta didik dapat diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat perhatian seperti istilah, konsep, atau kejadian penting yang pengaruhnya sangat kuat yang terdapat dalam buku teks pelajaran PPKn.
  3. Guru dapat menyiapkan diri dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Peserta didik dapat diberikan contoh-contoh yang terkait dengan materi yang ada di buku teks. Guru dapat memperkaya materi dengan membandingkan buku teks pelajaran PPKn dengan literatur lain yang relevan.
  4. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, denah, peta, dan dokumentasi audiovisual (film) dan lain sebagainya yang relevan.

- **Menanya**
  1. Peserta didik dapat membuat pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah mereka baca atau amati, mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun kepada sesama temannya ataupun mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.

2. Peserta didik dapat saling bertanya jawab berkaitan dengan apa yang sudah mereka baca atau amati.
3. Peserta didik dapat dilatih dalam bertanya dari pertanyaan yang faktual sampai pertanyaan yang hipotetikal (bersifat kausalitas). Diupayakan dalam membuat pertanyaan antara peserta didik satu dengan lainnya (khususnya teman sebangku) tidak memiliki kesamaan.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.2 Peserta didik sedang mengajukan pertanyaan saat diskusi.

- **Mengumpulkan informasi**
  1. Guru merancang kegiatan untuk mencari informasi lanjutan melalui bacaan dari sumber lain yang relevan, melakukan observasi atau wawancara kepada suatu instansi/lembaga atau tokoh-tokoh yang terkait dengan tugas terstruktur atau Praktik Belajar Kewarganegaraan.
  2. Peserta didik menentukan jenis data yang akan dikumpulkan (kualitatif atau kuantitatif) dan menentukan sumber data (dari buku, majalah, internet, dan sumber lainnya.
  3. Guru merancang kegiatan untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat/instansi/lembaga pemerintahan yang dianggap memahami suatu permasalahan yang sedang dikaji.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.3 Peserta didik sedang mengumpulkan informasi dari berbagai media.

- **Mengasosiasikan**
  1. Peserta didik dapat membandingkan, mengelompokkan, menentukan hubungan data, menyimpulkan, dan menganalisis informasi mengenai situasi yang terjadi saat ini melalui sumber bacaan yang terakhir diperoleh dengan sumber yang diperoleh dari buku untuk menemukan hal yang lebih mendalam.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.4 Peserta didik sedang menganalisis permasalahan dalam kelompok.

  2. Peserta didik menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan dari informasi yang diperoleh dari sumber lain.
  3. Dalam kegiatan mengasosiasikan, peserta didik diharapkan dapat melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, baik secara mandiri/ individual maupun secara kelompok.

- **Mengomunikasikan**
  1. Peserta didik dapat melaporkan, menyajikan, dan mempresentasikan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis, atau produk lainnya.
  2. Peserta didik dapat menerapkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tuntutan KI-4.



Sumber: dokumen penulis

Gambar 1.5 Peserta didik sedang mempresentasikan tugas kelompok.

3. Kegiatan mengomunikasikan dapat dilakukan dalam bentuk presentasi/ penyajian materi/penyampaian hasil temuan, baik secara kelompok maupun mandiri.
4. Kegiatan mengomunikasikan dapat dilakukan dengan menyerahkan hasil kerja (unjuk kerja) secara tertulis.
5. Kegiatan mengomunikasikan dapat dilakukan dengan menyerahkan hasil wawancara (laporan observasi).
6. Jika kegiatan dilakukan dalam bentuk bermain peran, peserta didik dapat membuat skenario cerita yang kemudian diperankan oleh peserta didik.
7. Dalam setiap pembuatan laporan hasil observasi/wawancara/Praktik Belajar Kewarganegaraan harus disertai dengan tanda tangan orang tua (komunikasi peserta didik dengan orang tua).

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 7
Keterkaitan Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat).	Melatih kesungguhan dan ketelitian, mencari informasi.
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik).	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.
Mengumpulkan Informasi	- Melakukan eksperimen - Membaca sumber lain selain buku teks pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X - Mengamati objek/ kejadian/ - Aktivitas - Wawancara dengan nara sumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengasosiasikan/ mengolah Informasi	- Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. - Mengolah informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
Mengkomunikasi-kan	Menyampaikan hasil pengamatan, dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan atau tertulis.	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

3. Model Pembelajaran PPKn

Sebagaimana disebutkan di atas, pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan, dengan strategi pembelajaran kontekstual. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa model pembelajaran yang merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintaks, pengaturan, dan budaya. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam PPKn yaitu *discovery learning, inquiry learning, problem-based learning,* dan *project-based learning.*

Discovery learning dan *inquiry learning* berorientasi pada penemuan, peserta didik dituntut untuk menemukan sesuatu. Biasanya sesuatu yang **ditemukan** itu adalah **konsep**. Artinya dengan belajar penemuan, anak-anak tidak diberi tahu terlebih dahulu konsepnya, dan setelah mereka mengamati, menanya, menalar, dan mencipta serta mencoba mereka akhirnya menemukan konsep itu. *Problem-based learning* adalah pembelajaran yang menyajikan **pemecahan masalah** kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk

belajar memecahkan masalah dunia nyata *(real world)*. Sedangkan *Project-based Learning* menekankan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kegiatan melakukan suatu proyek yang **menghasilkan suatu karya** melalui pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya di masyarakat.

Model Pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan pembelajaran berbasis *discovery* (penemuan) dan *inquiry* (pencarian) antara lain pembiasaan, keteladanan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan kajian dokumen historis.

Model pembelajaran berbasis masalah *(Problem-based Learning/PBL)* diterapkan melalui meneliti isu publik, klarifikasi nilai, pembelajaran berbasis budaya, kajian konstitusional, refleksi nilai-nilai luhur, dan debat pro-kontra.

Pembelajaran Berbasis Proyek *(Project-based Learning/PjBL)* adalah metoda pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Model pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek *(Project-based Learning/PjBL)* antara lain penciptaan suasana lingkungan, partisipasi dalam asosiasi, mengelola konflik, pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemilihan, projek belajar kewarganegaraan, partisipasi dalam asosiasi, bermain/simulasi, kajian karakter ketokohan, mengajukan usul dan petisi, dan berlatih demonstrasi damai.

Merujuk pada desain pembelajaran yang sudah dikemukakan, berikut ini disajikan berbagai model pembelajaran yang menjadi ciri khas mata pelajaran PPKn.

Tabel 9
Contoh Model-Model Pembelajaran Khas PPKn

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
1.	**Pembiasaan**	Penugasan dan pemantauan pelaksanaan sikap dan/atau perilaku kewargaan (sekolah/masyarakat/negara) yang baik oleh peserta didik.
2.	**Keteladanan**	Penampilan sikap dan/atau perilaku kewarganegaraan (sekolah/masyarakat/warga negara) yang baik dari seluruh unsur managemen sekolah dan guru.

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
3.	**Penciptaan Suasana Lingkungan**	Penataan lingkungan kelas/sekolah dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan/ kenegaraan, antara lain Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Foto Presiden dan Wakil Presiden.
4.	**Meneliti Isu Publik**	Peserta didik secara berkelompok ditugasi untuk melacak berita yang berisi masalah pelik dalam masyarakat dengan cara menghimpun kliping beberapa koran lokal dan/atau nasional, internet, dan sebagainya. Selanjutnya dipilih isu publik untuk dikaji secara kelompok tentang latar belakang dan kejelasan isu itu, serta memberikan klarifikasi yang cukup dapat dipahami orang lain.
5.	**Debat Pro-Kontra**	Dipilih suatu kebijakan publik (riil atau fiktif) yang mengundang pandangan pro dan kontra. Setiap kelompok siswa (2-3 orang) diprogram untuk masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seting debat dipimpin oleh guru atau peserta didik sebagai moderator. Dengan cara itu diharapkan terbiasa berargumentasi secara rasional dan elegan.
6.	**Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**	Peserta didik difasilitasi/ ditugasi untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu dari jaringan internet.
7.	**Melaksanakan Pemilihan**	Peserta didik difasilitasi untuk merencanakan dan melaksanakan pemilihan panitia karyawisata kelas atau pemilihan ketua kelas/ketua OSIS sekolah.
8.	**Partisipasi dalam Asosiasi**	Peserta didik difasilitasi untuk membentuk dan bekerja sama dalam klub-klub di sekolahnya dan masyarakat, misalnya klub pencinta alam, penyayang binatang, penjaga kelestarian lingkungan, dll
9.	**Mengelola Konflik**	Perta didik berlatih menengahi suatu konflik antar siswa di sekolahnya melalui bermain peran sebagai pihak yang terlibat konflik dan yang menjadi mediator konflik secara bergantian, dengan menerapkan mediasi konflik yang cocok.

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
10.	**Mengajukan Usul/ Petisi**	Diadakan simulasi menyusun usulan/petisi dari masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah setempat yang akan membuat jalan melewati tanah miliknya tanpa ganti rugi yang memadai. Petisi disampaikan secara damai.
11.	**Bermain Peran/ Simulasi**	Guru menentukan tema/bentuk permainan/ simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila. Peserta didik difasilitasi untuk bermain/ bersimulasi terkait nilai dan/atau moral Pancasila, yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
12.	**Pembelajaran Berba-sis Budaya**	Guru menggunakan unsur kebudayaan, di antaranya lagu daerah, benda cagar budaya, dll untuk mengantarkan nilai dan/ atau moral; atau guru melibatkan peserta didik untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan, pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
13.	**Kajian Karakter Ketokohan (Biografi)**	Peserta didik difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat pada bidang apa saja; menemukan karakter dari tokoh tersebut; menjelaskan mengapa tokoh tersebut itu menjadi idolanya dan menyusun biografinya.
14.	**Berlatih Demonstrasi Damai**	Guru menskenariokan adanya kebijakan publik yang merugikan hajat hidup orang banyak, misalnya penguasaan aset negara oleh orang asing, Kemudian peserta didik difasilitasi secara kelompok untuk melakukan demonstrasi damai kepada pihak pemerintah pusat.
15.	**Kajian Konstitusionalitas**	Peserta didik difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan dibawahnya mengenai materi pokok, suatu peristiwa/kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, misalnya pejabat setempat yang menerima uang suap. Secara berkelompok peserta didik diminta untuk menguji konstitusionalitas (kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada) berdasarkan diskusi mendalam dengan penuh argumentasi.

NO	NAMA MODEL	DESKRIPSI MODEL
16.	**Kajian Dokumen Historis**	Peserta didik difasilitasi untuk mencari/ menggunakan dokumen historis keindonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan/ ketentuan/peristiwa sejarah, dll dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait masa kini.
17.	**Klarifikasi Nilai**	Peserta didik difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terkait nilai itu, dan menjelaskan mengapa ia memilih posisi nilai itu.
18.	**Refleksi Nilai-Nilai Luhur Pancasila**	Secara selektif guru membuat daftar nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini dilupakan atau dilecehkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal guru memfasilitasi curah pendapat mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya setiap kelompok peserta didik (2-3) orang menggali apa kandungan nilai/moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
19.	**Projek Belajar Kewarganegaraan**	Secara klasikal peserta didik difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio, dan diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
20.	**Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)**	Secara berkala peserta didik difasilitasi untuk mengadakan kerjabakti membantu masyarakat sekitar dalam menanggulangi masalah sosial terkait kejadian atau bencana tertentu, sebagai kegiatan kemanusiaan.

Pemilihan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

a) Tujuan pembelajaran dan sifat materi pelajaran apakah materi itu termasuk ranah sikap, pengetahuan atau keterampilan.
b) Karakteristik kemampuan peserta didik misalnya kemampuan membaca, motivasi dalam belajar, kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
c) Alokasi waktu yang tersedia.
d) Sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia.
e) Ketersediaan fasilitas/ sarana dan prasarana seperti kondisi ruang kelas, fasilitas perpustakaan, akses internet.

Pemilihan model pembelajaran ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Model pembelajaran yang digunakan hendaknya memperhatikan identifikasi materi yaitu tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam Kompetensi Dasar, misalnya tingkatan pengetahuan "memahami" berbeda dengan tingkatan pengetahuan "menganalisa" dalam pemilihan model pembelajaran. Selain itu, juga memperhatikan materi sesuai dengan ranah sikap, pengetahuan atau keterampilan. Contoh model pembelajaran "memahami nilai-nilai Pancasila" berbeda dengan model pembelajaran untuk" menganalisis nilai-nilai Pancasila".

Tabel 10

Contoh Keterkaitan Materi dengan Model Pembelajaran PPKn Kelas X

Kompetensi Dasar	Materi	Model Pembelajaran
1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.5 Mengamalkan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.5 Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5 Menyajikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1. Konsep integrasi nasional 2. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 3. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia 4. Tantangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Peran serta warga negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 2. Debat pro-kontra Contoh: Peserta didik secara berkelompok ditugasi untuk mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik melakukan debat pro-kontra tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.

4. Penilaian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

a. Pengertian Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berdasarkan pada PP. Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan bahwa "Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.

Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar, adalah sebagai berikut.

1) Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.
2) Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.
3) Meningkatkan motivasi belajar siswa.
4) Evaluasi diri terhadap kinerja peserta didik.

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian menegaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.

b. Pendekatan Penilaian

1) Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut.

a) Penilaian merupakan bagian dari pembelajaran, bukan terpisah dari pembelajaran.

b) Penilaian mencerminkan hasil pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah.

c) Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar.

d) Penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

e) Penilaian mencakup penilaian pembelajaran dan hasil belajar.

2) Penilaian Acuan Kriteria (PAK)

PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Sejalan dengan ini maka guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas *(mastery learning)* serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum semata.

c. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana mengacu kepada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 4 sebagai berikut.

a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

d. Bentuk dan Teknik Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

1) Penilaian Sikap

Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu *sikap spiritual* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan *sikap sosial* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian "teman sejawat" *(peer evaluation)* oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian *(rating scale)* yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi menggunakan daftar cek atau skala penilaian *(rating scale)* yang disertai rubrik.
b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian *(rating scale)* yang disertai rubrik.

c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik menggunakan daftar cek atau skala penilaian *(rating scale)* yang disertai rubrik. Instrumen teknik ini pada dasarnya sama dengan teknik penilaian diri, namun diisi oleh teman. Oleh karena itu, lembar penilaian antarpeserta didik dapat menggunakan lembar penilaian penilaian diri.

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sikap sosial dan spritual yang nampak pada diri peserta didiki diamati dan dicatat dalam lembar jurnal. Bentuk format lembar jurnal dapat dibuat berdasarkan peserta didik secara individu atau waktu muncul sikap.

Penilaian sikap tersebut dilakukan sesuai kebutuhan guru di lapangan, misalnya dilakukan setiap bulan sekali, tiga bulan sekali, atau enam bulan sekali.

2) Penilaian Pengetahuan

Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Perkembangan pencapaian kompetensi pengetahuan melalui tahapan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Gradasi pencapaian kompetensi pengetahuan PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengingat, SMP/MTs adalah memahami dan menerapkan, dan SMA/MA/SMK/MAK adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Tahapan ini perlu dipahami guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam menyusun kisi-kisi penilaian.

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

a) **Instrumen tes tulis** berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.

(1) Pilihan Ganda

Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan alternatif pilihan jawaban. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(2) Isian

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal yang jawabannya menuntut siswa untuk melengkapi atau mengisi kata-kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Soalnya disusun seperti kalimat

lengkap, kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh siswa. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(3) Jawaban Singkat

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal obyektif yang jawabannya menuntut siswa menjawab soal dengan singkat yaitu jawabannya dapat berupa satu kata, kelompk kata/frase, simbol matematika, atau angka. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(4) Benar Salah

Bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal obyektif yang setiap soalnya terdapat dua macam kemungkinan jawaban yang berlawanan yaitu benar atau salah. Bentuk soal benar-salah biasanya dipergunakan untuk menanyakan fakta, ide, dan konsepsi yang kompleks. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan.

(5) Menjodohkan

Bentuk ini wujudnya terdiri atas dua kelompok atau kolom. Tugas siswa adalah mencari pasangan yang tepat dalam dua kelompok itu. Biasanya bentuk menjodohkan hanya terbatas untuk mengukur kemampuan ingatan.

(6) Uraian

Soal uraian adalah soal yang menuntut jawaban peserta tes dengan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang dipelajari dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan.

Soal uraian dibagi atas uraian terstruktur dan uraian tidak terstruktur. Soal uraian terstruktur memiliki jawaban yang terbatas dan jelas. Sedangkan uraian tidak terstruktur memiliki jawaban yang sangat variatif.

Bentuk soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah dan menjodohkan, lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian sekolah, atau untuk latihan bagi pengayaan. Sedangkan saat ulangan harian lebih tepat menggunakan soal uraian, sehingga dapat mengembangkan berpikir divergen (beragam).

b) **Instrumen tes lisan** berupa daftar pertanyaan.

Tes lisan adalah tes yang pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau tanpa pedoman pertanyaan.

c) **Instrumen penugasan** berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

Penugasan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi pengetahuan antara lain membuat kliping, mencari data, wawancara, merangkum, kajian tokoh, kajian historis, dan menulis gagasan,

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian kompetensi ketrampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengamati dan menanya, SMP/MTs adalah mencoba (interaksi dan partisipasi kewarganegaraan), menyaji, dan menalar, sedangkan jenajang SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba dan menyajikan. Tahapan ini perlu dipahami oleh guru untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam kisi-kisi penilaian.

Teknik penilaian kompetensi keterampilan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

a) **Tes Praktik**

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik dalam pembelajaran PPKn antara lain melalui simulasi, tes perbuatan, sosiodrama.

b) **Proyek**

Penugasan proyek adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu umumnya menggunakan data. Penilaian proyek mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penugasan proyek dalam PPKn antara lain melalui Proyek Belajar Kewarganegaraan. Penilaian Proyek Belajar Kewarganegaraan dilaksanakan pada setiap langkah kegiatan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan penyajian.

Penilaian meliputi penilaian proses dan hasil dari kegiatan ini. Penilaian proses antara lain mencakup persiapan, kerja sama, partisipasi, koordinasi, aktifitas, dan yang lain dalam penyusunan maupun dalam presentasi hasil kerja. Sedangkan penilaian hasil mencakup dokumen laporan dan presentasi laporan.

c) **Portofolio**

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Penilaian portofolio dapat dilakukan saat menerapkan model pembelajaran pengabdian masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, mengajukan usul/petisi, partisipasi dalam asosiasi, membangun koalisi, mengelola konflik, berlatih empati dan toleransi, kunjungan lapangan dan model pembelajaran yang lain.

Penilaian portofolio dapat dilakukan untuk menilai kompetensi dasar tentang berinteraksi dengan teman dan menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan. Kedua kompetensi dasar ini merupakan praktik kewarganegaraan yang dapat dilaksanakan pada setiap materi pokok.

F. Remedial

Pembelajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Pemberian pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu pertama mendiagnosis kesulitan belajar, dan kedua memberikan perlakuan *(treatment)* pembelajaran remedial.

Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain adalah tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat keterampilan), tes diagnostik, wawancara, dan pengamatan.

Bentuk-bentuk kesulitan belajar peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian saat mengikuti pembelajaran.
2. Kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan.
3. Kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya tuna rungu, tuna netra, dan tuna daksa.

Pembelajaran remedial mempunyai fungsi yang amat penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Beberapa fungsi pengajaran remedial tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar.
2) Melalui pengajaran remedial membantu murid untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan kegiatan belajar. Murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya sehingga mempunyai peluang besar untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Tuntutan belajar yang diberikan murid telah disesuaikan dengan sifat jenis dan latar belakang kesulitannya sehingga murid diharapkan lebih terdorong untuk belajar.
3) Melalui pengajaran remedial memungkinkan guru, murid dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi murid. Demikian pula murid diharapkan dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi murid.
4) Melalui pengajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler, dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Pengayaaan lain adalah dalam segi metode dan alat yang dipergunakan adalam pengajaran remedial. Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh murid dapat lebih banyak, lebih luas, dan lebih dalam sehingga hasil belajarnya lebih kaya.
5) Dengan pengajaran remedial secara langsung atau tidak langsung dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian murid yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Penyembuhan kondisi kepribadian dapat menunjang pencapaian prestasi belajar, demikian pada sebaliknya.
6) Melalui pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dalam arti waktu maupun materi. Misalnya; murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pengajaran remedial.

Pembelajaran remedial tidak hanya dilaksanakan kepada peserta didik yang memiliki capaian kompetensi di bawah yang diharapkan. Pembelajaran remedial dalam pembelajaran PPKn dilaksanakan untuk kelompok peserta didik di antaranya yang memiliki hal-hal sebagai berikut:

1) Perhatian yang sangat kurang dan mudah terganggu dengan sesuatu yang lain di sekitarnya pada saat belajar.
2) Secara relatif lemah kemampuan memahami secara menyeluruh.
3) Kurang dalam hal memotivasi diri dalam belajar.
4) Kurang dalam hal kepercayaan diri dan rendah harapan dirinya.
5) Lemah dalam kemampuan pemecahan masalah.

6) Sering gagal dalam menyimak suatu gagasan dari suatu informasi.
7) Mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep yang abstrak.
8) Gagal menghubungkan suatu konsep lainnya yang relevan.
9) Memerlukan waktu relatif lama daripada yang lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas (Kunandar, 2008).

Pembelajaran remedial dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%.
b. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%.
c. Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20 % tetapi kurang dari 50%.
d. Pemanfaatan tutor teman sebaya.

G. Pengayaan

1. **Prinsip-Prinsip Kegiatan Pengayaan**

   Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimilikinya sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik.

2. **Ragam Kegiatan Pengayaan**

   Berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan, jenis-jenis Program Pengayaan yaitu:

   a) Kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan dan dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud contohnya: bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba, yang secara regular tidak tercakup dalam kurikulum.
   b) Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri.
   c) Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif/ penelitian ilmiah.

Pemecahan masalah ditandai dengan:
a) Identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan;
b) Penentuan fokus masalah/problem yang akan dipecahkan;
c) Penggunaan berbagai sumber;
d) Pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan;
e) Analisis data; dan
f) Penyimpulan hasil investigasi.

Jenis kegiatan yang dirancang guru dalam mengembangkan potensi siswa dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki siswa kelompok cepat yaitu:

1) **Tutor Sebaya**

Kegiatan ini membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dapat merupakan kegiatan penambahan wawasan pengetahuan siswa. Melalui kegiatan ini, pemahaman siswa terhadap suatu konsep atau ide yang akan dijelaskan mereka juga harus mencari teknik untuk menjelaskan konsep atau ide tersebut.

2) **Mengembangkan Latihan**

Selain memberikan tutorial kepada temannya, siswa kelompok cepat dapat juga diminta untuk mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman–temannya. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk pendalaman materi yang menuntut banyak latihan misalnya pengerjaan soal cerita.

3) **Mengembangkan Media dan Sumber Pembelajaran**

Memberikan kesempatan pada siswa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari merupakan sesuatu yang menarik bagi siswa kelompok cepat.

4) **Melakukan Proyek**

Salah satu kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan bagi kelompok cepat adalah mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proyek khusus atau mempersiapkan suatu laporan khusus. Keterlibatan siswa dalam melakukan suatu proyek merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki atau untuk menambah wawasan baru mereka.

5) **Memberikan Permainan, Masalah, atau Kompetensi Antarsiswa**

Dalam kegiatan pengayaan guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah atau permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Melalui kegiatan ini mereka akan belajar satu sama lain dengan membandingkan strategi atau teknik yang mereka pergunakan dalam memecahkan permasalahan atau permainan yang diberikan.

H. Interaksi dengan Orang Tua

Dalam penyelenggaraan pendidikan banyak pihak yang terlibat mensukseskan keberhasilan pendidikan. Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik.
2. Pendidik (guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru pembina kegiatan ekstrakurikuler).
3. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
4. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas).
5. Dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Orang tua tentunya memiliki peran dan andil yang sangat besar dalam mensukseskan pendidikan nasional, termasuk dalam pembelajaran. Orang tua dapat menjadi pendorong sukses atau tidaknya peserta didik dalam menempuh pembelajaran.

Oleh karenanya sekolah harus melakukan interaksi dengan orang tua mengenai seluruh aktivitas dan kemajuan belajar peserta didik. Prinsipnya pendidikan adalah pelayanan. Orang tua menjadi para pihak yang menggunakan sekolah dan tentunya harus dilayani. Dilayani dalam kapasitas dunia pendidikan seperti hal-hal sebagai berikut.

a. Mendapatkan informasi tentang program sekolah.
b. Memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan sekolah.
c. Mendapatkan informasi kemajuan belajar anaknya.
d. Memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapannya tentang kemajuan belajar anaknya, dan hal lainnya.

Untuk informasi kemajuan belajar anak, orang tua dapat mendapatkan informasi dari guru atau wali kelas. Diperlukan sebuah informasi khusus yang dibuat oleh guru/wali kelas dan ditujukan kepada orang tua siswa. Kemudian orang tua menandatangani serta memberikan komentarnya. Apabila semua itu dilakukan maka seluruh kegiatan pembelajaran menjadi lengkap, diharapkan peserta didik memiliki kemajuan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format berikut ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

Bagian 2

Petunjuk Khusus Pembelajaran Per Bab

Buku ini merupakan pedoman guru dalam mengelola program pembelajaran terutama dalam memfasilitasi peserta didik untuk mendalami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana terdapat dalam buku siswa. Materi pelajaran *PPKn* yang terdapat pada buku siswa akan diajarkan selama 1 (satu) tahun pelajaran. Sesuai dengan desain waktu dan materi, setiap bab akan diselesaikan dalam waktu 4 minggu atau 4 kali pertemuan. Agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan sistematis, secara umum, program pembelajaran setiap pertemuan dirancang terdiri dari: (1)Kompetensi Inti (2) Kompetensi dasar (3) Indikator Pencapaian Kompetensi (4) Materi dan Proses Pembelajaran, (5) Penilaian, (6) Remedial, (7 Pengayaan) dan (8) Interaksi Guru dan Orang tua.

Berdasarkan pemahaman tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), guru PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan membaca dari berbagai literatur atau sumber bahan ajar yang relevan dengan materi pembelajaran.
2. Guru dapat menggunakan isu-isu aktual untuk dapat mengajak peserta didik dalam mengembangkan kemampuan analisis dan evaluatif dengan mengambil contoh kasus dari situasi yang berkembang saat ini.
3. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, dan dokumentasi audiovisual (film) yang relevan dengan materi pelajaran.
4. Guru harus memberikan motivasi dan mendorong peserta didik secara aktif (*active learning*) untuk mencari sumber dan contoh-contoh konkret dari lingkungan sekitar.
5. Guru harus menciptakan situasi belajar yang memungkinkan peserta didik melakukan observasi dan refleksi. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca buku yang relevan disertai dengan analisis yang bersifat kritis, membuat laporan tertulis secara sederhana, melakukan wawancara dengan narasumber, menonton film dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan materi.
6. Peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan wacana/gambar, memberikan pertanyaan-pertanyaan serta mempertahankan pendapatnya pada setiap jalannya diskusi dalam proses pembelajaran di kelas.

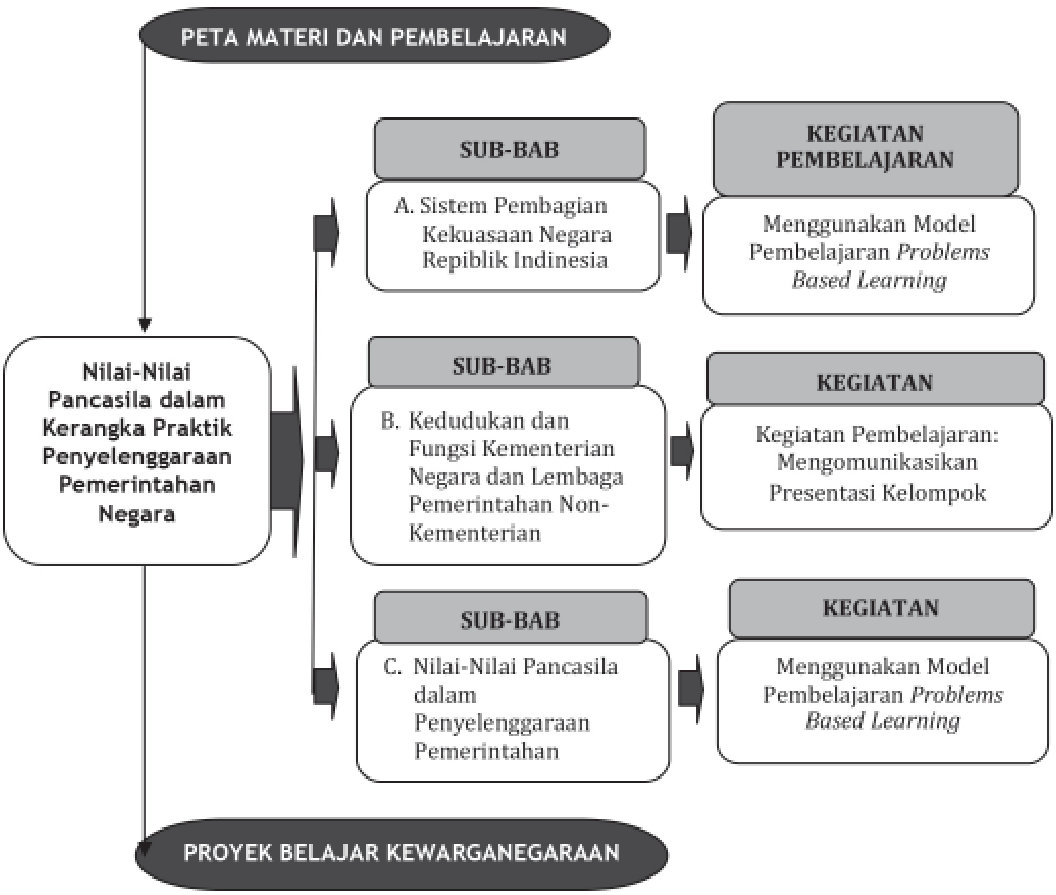
7. Guru dapat mengaitkan konteks materi pelajaran dengan konteks lingkungan tempat tinggal peserta didik (kabupaten/kota, provinsi, pulau) pada proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas.
8. Peserta didik harus selalu dimotivasi agar memiliki kemampuan dalam mengomunikasikan hasil proses pengumpulan dan analisis data terkait dengan materi yang sedang diajarkan.
9. Penggunaan media/alat/bahan pelajaran hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekolah, khususnya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Jika dipandang perlu, pendidik dapat memanfaatkan teknologi informasi atau pendidik dapat membuat media pembelajaran yang bersifat sederhana yang menunjang penguasaan materi pembalajaran secara efektif dan efisien.
10. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyerapan materi pelajaran, guru dapat membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik dalam kelas. Kelompok yang telah ditetapkan ditugaskan untuk membuat bahan presentasi kelompok dan mempresentasikannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka.
11. Pelaksanaan Proyek Belajar Kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam kelompok dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/instansi terkait sehingga peserta didik mendapatkan informasi secara lengkap. Contoh, bekerja sama dengan tokoh agama/masyarakat, pengurus RT/RW, kepala kelurahan/pemangku/pejabat pemerintahan, dan pihak lainnya.

Untuk Perhatian

1. **Uraian kegiatan atau pertemuan setiap bab merupakan CONTOH SEMATA atau PILIHAN, bukan sesuatu yang bersifat mutlak harus diterapkan secara utuh oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.**
2. **GURULAH yang berhak untuk mendesain dan menentukan proses pembelajaran di kelas, menentukan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pokok, pendekatan, model dan metode, penilaian pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan guru, karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, sumber belajar serta alokasi waktu yang tersedia. Namun demikian, dalam proses pembelajaran harus tetap sesuai dengan Kurikulum 2013.**

Bab 1

Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1.1.1. Membangun nilai-nilai toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 1.1.2. Membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.1.1. Membangun nilai-nilai toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. 2.1.2. Membangun nilai-nilai kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara.

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	3.1.1. Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. 3.1.3. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. 3.1.4. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara.	4.1.1 Menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 4.1.2 Mengomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. Materi Pembelajaran Bab 1

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 1 adalah **Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,** dengan Sub bab sebagai berikut.

1. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.
3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur).

D.Proses Pembelajaran

1. PERTEMUAN PERTAMA

Pertemuan pertama ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik; bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya; bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn; bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan.
3) Menyaji hasil analisis yang mengenai tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.
4) Mengomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

b. Materi Pelajaran

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu:

(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang
(c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan negara dibagi:

(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
(c). Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

(a). Pembagian kekuasaan secara horizontal

(1). Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5). Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

(b). Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning*** sebagai berikut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (SMA). 3. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 4. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Gambar 1.1. tentang foto presiden dengan para menteri di Istana Negara serta membaca buku Bab 1. Sub Bab A Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia.  Sumber: www.merdeka.com Gambar 2.1 Foto Presiden dan Para Menteri 5. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait dengan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 6. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis nanti.

<table>
<tr><th>SINTAK</th><th>DESKRIPSI KEGIATAN</th></tr>
<tr><td>Mengorganisasi peserta didik untuk belajar</td><td>
1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan 4 - 5 orang siswa, dengan pembagian tugas sebagai berikut.
- Kelompok 1 dan 2
Analisis tentang kekuasaan konstitutif
- Kelompok 3 dan 4
Analisis tentang kekuasaan legislatif
- Kelompok 5 dan 6
Analisis tentang kekuasaan yudikatif
- Kelompok 7
Analisis tentang kekuasaan kekuasaan eksaminatif
2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan menuliskan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan.
3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.
4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut.
a. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945.
b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya.
c. Permasalahan yang dihadapi lembaga negara tersebut.
d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.
</td></tr>
</table>

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang Tugas yang diberikan sesuai dengan penugasannya yaitu sebagai berikut. a. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945. b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya. c. Permasalahan yang dihadapi lembaga negara tersebut. d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi lembaga negara tersebut. 3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang *(powerpoint)* atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta preses berlangsungnya tugas kelompok. 2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

(1). Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. (*Panduan Observasi Terlampir*)

(2). Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran *problem based learning* di atas.

(3). Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

2. PERTEMUAN KEDUA

Pertemuan kedua akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
2) Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Materi Pelajaran

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

(a). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(b). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(c). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(d). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(a). Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

(b). Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

(c). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

(a). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(c). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:
(a). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(b). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(c). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(c). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. LPNK itu diantaranya adalah; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan lain-lain.

c. Kegiatan Pembelajaran

Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
<u>Pendahuluan</u> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Guru menyampaikan topik tentang "Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian". 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 1 agar mempersiapkan kelompoknya).

Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Inti 1. Presentasi kelompok 1, topik Bab 1, Sub-Bab B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. 2. Pada saat Kelompok 1 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada latihan Tugas Mandiri 1.2. dan Tugas Mandiri 1.3. serta Tugas Kelompok 1.2.

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Presiden dan Nama Kabinet

Presiden Ke-	Nama Presiden	Nama Kabinet

Tabel 1.3. Pengelompokan Kementerian

No	Lingkup Tugas	Nama Kementerian
1	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
2	Bidang Perekonomian	
3	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
4	Bidang Kemaritiman	

Tugas Kelompok 1.4.
Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian.

Bacalah secara berkelompok buku sumber dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang disebutkan di atas. Tulislah hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.
Tugas dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian

No	Nama Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	Tugas dan Fungsi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. PERTEMUAN KETIGA DAN KEEMPAT

Pertemuan ketiga akan membahas materi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan diharapkan peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1) Membangun nilai-nilai Toleransi dan Kejujuran dalam kerangka praktik penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Materi Pelajaran

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya.

Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin *good governance* yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif.

Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

c. **Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran **Problem Based Learning,** sebagai berikut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku BAB 1, Sub Bab C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca sub bab tersebut. 4. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan 4 - 5 orang. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak “benar” sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 5. Selama penyelidikan peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 6. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. 7. Peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah tersebut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. a. Nilai Ketuhanan b. Nilai Kemanusiaan c. Nilai Persatuan d. Nilai Kerakyatan, dan e. Nilai Keadilan Sosial 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut diatas dan pemecahan masalah jika nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI. 3. Guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi dan menyelidiki penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh kelompok. 4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya. 5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing kelompok untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang sudah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pemecahan masalah jika nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI 2. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil identifikasi penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (*powerpoint*) atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru memberikan bimbingan agar peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai Pancasila manakah yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan upaya pemecahan masalah jika nilai-nilai tersebut belum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan RI 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya. 3. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan.

d. Penilaian

1. **Penilaian Sikap**

   Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan penilaian diri dan penilaian antarteman.

2. **Penilaian Pengetahuan**

   Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran *problems based learning* di atas.

3. **Penilaian Keterampilan**

   Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).



UJI KOMPETENSI BAB 1

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….
   a. kekuasaan legislatif
   b. kekuasaan eksekutif
   c. kekuasaan yudikatif
   d. kekuasaan federatif
   e. kekuasaan koordinatif

2. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….
   a. Pasal 20 Ayat (1)
   b. Pasal 20 Ayat (2)
   c. Pasal 20 Ayat (3)
   d. Pasal 20 Ayat (4)
   e. Pasal 20 Ayat (5)

3. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….
   a. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
   b. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
   c. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
   d. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
   e. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan

4. Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….
   a. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
   b. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
   c. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
   d. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
   e. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

5. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….
   a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
   b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

c. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
e. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ….
a. Bentuk negara kesatuan
b. Bentuk negara federasi
c. Bentuk pemerintahan republik
d. Sistem pemerintahan presidensil
e. Sistem pemerintahan parlementer

7. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 4 dan 6
e. 5 dan 6

8. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* ….
a. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
b. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan

d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

9. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
a. 2 dan 4
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 1 dan 2
e. 3 dan 4

10. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali* ….
a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
e. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Pada hakikatnya kekuasaan negara menurut teori trias, Montesquie terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdsarkan hal tersebut, jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!
2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Negara. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
3. Pada dasarnya selain memiliki Kementerian Negara, pemerintah Republik Indonesia memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dahulu dikenal dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen. Jelaskan dan berikan contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Republik Indonesia!

4. Pada hakikatnya Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebutkan 3 (tiga) tugas kementerian negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara!
5. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah daerah menunjang pemerintah pusat dalam menjalankan efektifitas dan efisiensi pemerintahan Negara. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	D
2	A	7	D
3	A	8	E
4	C	9	A
5	D	10	D

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Jenis-jenis kekuasaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.	**3**

No	Jawaban	Skor
2	Karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	**6**

No	Jawaban	Skor
	5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.	
3	Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut. a. Badan Intelijen Negara (BIN) b. Badan Narkotika Nasional (BNN) c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	**3**

No	Jawaban	Skor
	f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) g. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) h. Badan Pertanahan Nasional (BPN) i. Badan Pusat Statistik(BPS) j. Badan SAR Nasional (Basarnas) k. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) l. Dan lain-lain	
4	Tugas kementerian negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara ada 3 sebagai berikut. 1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.	**3**

No	Jawaban	Skor
5	Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting karena secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal. Dengan kata lain, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.	**3**
SKOR TOTAL		**18**

D. **Penilaian Soal Uraian**

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{18} X\ 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 1. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

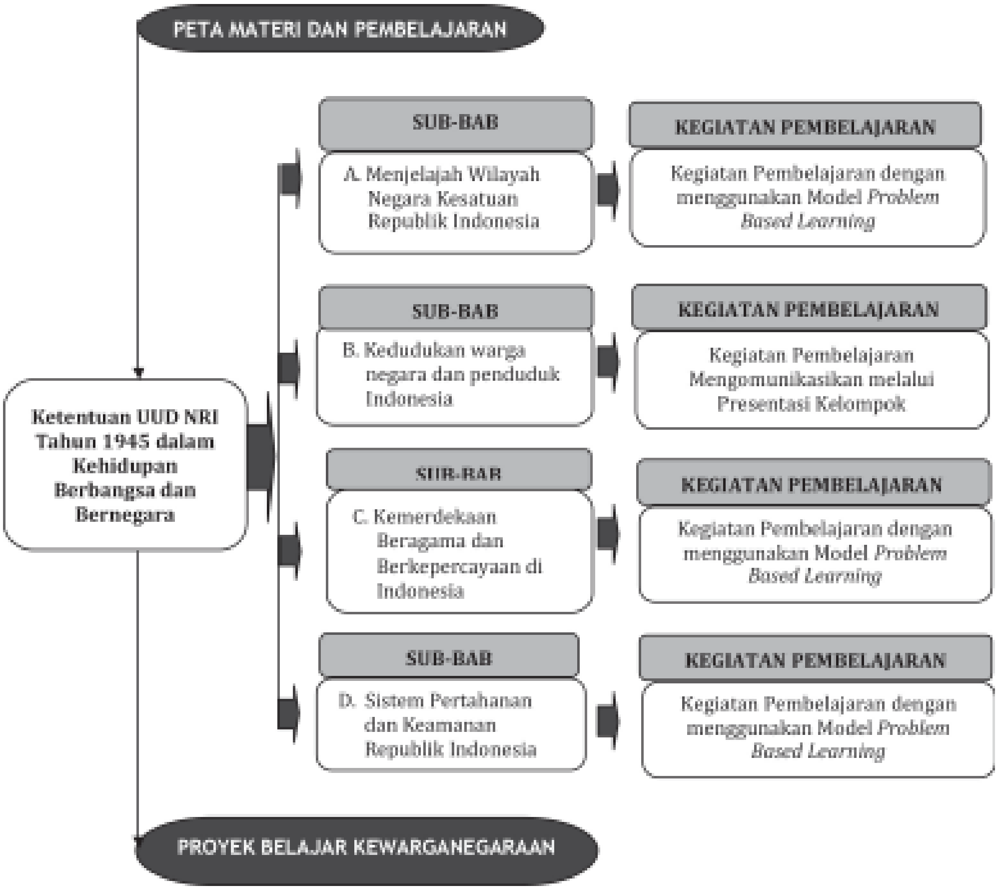
1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 1.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 1.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk "Proyek Belajar Kewarganegaraan".

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

Bab
2

Pembelajaran Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.2. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.	1.2.1. Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 1.2.2. Membangun nilai-nilai kerja sama secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	2.2.1. Membangun nilai-nilai menghargai yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	2.2.2. Membangun nilai-nilai kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan, dan keamanan
3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	3.2.1. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 3.2.2. Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia 3.2.3. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia 3.2.4. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia
4.2. Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2.1 Menyajikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 4.2.2 Mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

C. Materi Pembelajaran Bab 2

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 2 adalah **Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,** dengan Sub-Bab sebagai berikut.

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.
3. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
4. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. (materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur).

D. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 2 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran pembelajaran materi Bab 1. Di samping itu, juga untuk memberikan penguatan kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 1 relatif kurang berhasil (Remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2) Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

b. Materi Pelajaran

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara tersebut.

2. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya.

Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara di mana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru menyampaikan topik tentang menjelajah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu, terkait dengan sikap sosial. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur atas karunia Allah SWT, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas dengan bail, sehat serta atas dasar keimanan terhadap Allah SWT. 4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru menunjukkan ilustrasi/paparan secara singkat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Peserta didik disajikan Gambar 2.2. tentang peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Sumber: www.ajengrahmap.wordpress.com Gambar 3.1 Peta Wilayah NKRI

Deskripsi Kegiatan
3. Peserta didik diberi waktu untuk mengamati gambar tersebut. 4. Peserta didik membuat pertanyaan tentang Gambar 2.2. mengenai peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (diharapkan peserta didik dapat membuat lima (5) pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 5. Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi wilayah darat, laut, dan udara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Secara random peserta didik (1 sampai dengan 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang kasus tersebut. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan topik tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan penugasan kepada peserta didik.

a) Membuat 5 pertanyaan atas Gambar 2.2. Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi. Tuliskan pertanyaan yang kalian susun dalam tabel di bawah ini.

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara?
2.	
3.	
4.	
5.	

b) Mengumpulkan tugas analisis kelompok atas wilayah darat, laut, dan udara yang merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan (2 s/d 3 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
2) Membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

b. Materi Pelajaran

Perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.

1. Penduduk dan Bukan Penduduk

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.

2. Warga Negara dan Bukan Warga Negara

Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting, menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(a). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(b). Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(c). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

c. Kegiatan Pembelajaran

Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Guru menyampaikan topik tentang “kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia”. 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 2 agar mempersiapkan kelompoknya).

Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Inti 1. Presentasi Kelompok 2, topik Bab 2, Sub-Bab B. kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 2. Pada saat Kelompok 2 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 2, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan di presentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menganalisis jumlah penduduk Indonesia sejak 3 (tiga) tahun terakhir (dari internet/website). Analisis ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut.

(a). Jumlah penduduk/tahun.
(b). Prosentase kenaikan jumlah penduduk.
(c). Faktor pendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk Indonesia.
(d). Keterkaitan jumlah penduduk (SDM) dengan pembangunan nasional.
(e). Permasalahan-permasalahan tentang kependudukan.
(f). Solusi terhadap pemecahan masalah kependudukan.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga akan membahas materi tentang Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2) Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

b. Materi Pelajaran

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2).

(a). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(b). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

(a). Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.

(b). Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.

(c). Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.

(d). Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.



Sumber: www.antaranews.com

Gambar 3.2 Indahnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghomati, dan toleran apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model ***Problem Based Learning*** sebagai berikut.

Sintak	Deskripsi Kegiatan
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku BAB 2, Subbab C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 3. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca subbab tersebut. 4. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan antara 4 - 5 orang. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar" sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 5. Selama penyelidikan peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia. 6. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. 7. Peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah tersebut.

Sintak	Deskripsi Kegiatan
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia, ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. a. Landasan hukum kebebasan beragama di Indonesia b. Makna kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME c. Toleransi dan kerja sama antar umat beragama di Indonesia d. Tantangan dan hambatan dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia e. Peran pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut di atas dan pemecahan masalah terhadap permasalahan keberagaman di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. 3. Guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi dan menyelidiki kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia oleh kelompok. 4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya. 5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia 2. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia 3. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang *(powerpoint)* atau laporan tertulis. 4. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.

Sintak	Deskripsi Kegiatan
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru memberikan bimbingan agar peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang berhubungan dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia. 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya. 3. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dilakukan dengan menggunakan observasi. Observasi terhadap peserta didik terkait dengan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik, yaitu dengan mengerjakan Tugas Mandiri 2.3. Mengidentifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik. Tugas peserta didik adalah mengidentifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang terdapat dalam dua peraturan tersebut. Minta agar peserta didik menuliskan hasil identifikasi ke dalam tabel di bawah ini.

No	Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama	Penjelasan
1		
2		
3		
4		
5		

No	Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama	Penjelasan
6		
7		
8		

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomuniikasikan).

4. Pertemuan Keempat

Pertemuan keempat membahas materi tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2) Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.

b. Materi Pelajaran

1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Upaya mempertahankan kemerdekaan termaktub ke dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.



Sumber: www.lampost.co

Gambar 3.3 Manunggal TNI dengan Rakyat

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta *(Sishankamrata)*. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

2. **Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara**

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada pada negara dan bangsa.

Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata. Tetapi, dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik. 2. Guru menyampaikan topik tentang "Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia".

Deskripsi Kegiatan
<u>Kegiatan Inti</u> 1. Sebelum peserta didik mengidentifikasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, guru dapat menjelaskan bagaimana Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 2. Guru memaparkan secara singkat tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. (Dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik). 4. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Bab 2, buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X (Subbab D dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumber lainnya). 5. Peserta didik melakukkan analisis Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 6. Secara random (1 s/d 2 orang) peserta didik dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
<u>Penutup</u> 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dalam bentuk Penilaian Diri dan Penilaian Antar Peserta Didik.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan yang Tugas Kelompok 2.3. Identifikasi Tugas dan Fungsi TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Bacalah Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lakukan identifikasi bersama teman sebangku mengenai tugas dan fungsi TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel berikut.

No	Lembaga	Tugas dan Fungsi
1.	Tentara Nasional Indonesia	
2.	Kepolisian Republik Indonesia	

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain 1 s.d 2 orang).



UJI KOMPETENSI BAB 2

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ....
   a. Penduduk
   b. Orang asing
   c. Warga negara
   d. Bukan penduduk
   e. Bukan warga negara

2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ....
   a. Hak opsi
   b. *Ius soli*
   c. Hak repudiasi
   d. Naturalisasi
   e. *Ius sanguinis*

3. Seorang keturunan bangsa B (*ius sanguinis*) lahir di negara A (*ius soli*). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ....
   a. *Ius Soli*
   b. *Apatride*
   c. *Bipatride*
   d. *Ius Sanguinis*
   e. Naturalisasi

4. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah ....
   a. Asas keterbukaan
   b. Asas kebenaran substantif
   c. Asas kepentingan nasional
   d. Asas perlindungan maksimum
   e. Asas publisitas

5. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ....

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut.
c. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

6. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….
   a. Memasuki anggota partai politik
   b. Membantu fakir miskin dan anak terlantar
   c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
   d. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
   e. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

7. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, *ilegal fishing* merupakan salah satu ancaman terhadap ….
   a. Patriotisme
   b. Kedaulatan negara
   c. Ketenteraman negara
   d. Keamanan Indonesia
   e. Pertahanan Indonesia

8. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….
   a. Kekuatan utama sistem keamanan
   b. Kekuatan utama sistem pertahanan
   c. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
   d. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
   e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

9. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….
   a. Menjadi prajurit TNI/Polri
   b. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
   c. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
   d. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
   e. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

10. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ....
    a. Bela negara
    b. Sistem bela negara
    c. Pertahanan negara
    d. Sistem keamanan nasional
    e. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia!
2. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI!
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia?
5. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	C	6	A
2	E	7	B
3	C	8	D
4	C	9	C
5	E	10	A

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.	**2**
2	Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.	**4**

No	Jawaban	Skor
	b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun). d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas kontinen.	

No	Jawaban	Skor
3	Seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Berdasarkan hal tersebut di atas segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.	**3**

No	Jawaban	Skor
4	Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan YME mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik itu oleh pemerintah, pejabat pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.	**2**
5	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.	**2**
SKOR TOTAL		**13**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{13} X\ 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 2. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 2. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 2.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 2.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk "Proyek Belajar Kewarganegaraan".

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

PERSIAPAN UJIAN TENGAH SEMESTER 1



A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….
   a. kekuasaan legislatif
   b. kekuasaan eksekutif
   c. kekuasaan yudikatif
   d. kekuasaan federatif
   e. kekuasaan koordinatif

2. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….
   a. Pasal 20 Ayat (1)
   b. Pasal 20 Ayat (2)
   c. Pasal 20 Ayat (3)
   d. Pasal 20 Ayat (4)
   e. Pasal 20 Ayat (5)

3. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….
   a. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
   b. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara
   c. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri
   d. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara
   e. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

4. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah ….
   a. Membentuk kabinet menteri
   b. Membahas rancangan undang-undang APBN
   c. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan APBN
   d. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
   e. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

5. Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ….
   a. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
   b. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

c. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
d. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
e. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

6. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….
   a. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
   b. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
   c. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
   d. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
   e. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

7. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara ….
   a. Eksekutif
   b. Legislatif
   c. Yudikatif
   d. Negara dan kepala pemerintahan
   e. Pemerintahan dan kepala eksekutif

8. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
   (1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden
   (2). Kabinet dibentuk oleh presiden
   (3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
   (4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

   Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari ….
   a. Bentuk negara kesatuan
   b. Bentuk negara federasi
   c. Bentuk pemerintahan republik
   d. Sistem pemerintahan presidensial
   e. Sistem pemerintahan parlementer

9. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan presidensial ….
   a. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
   b. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
   c. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
   d. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
   e. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen

10. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* ….

a. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
b. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

11. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini!
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ….
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 4 dan 6
e. 5 dan 6

12. Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali* ….
a. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
b. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
d. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
e. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini

13. Perhatikan data di bawah ini:
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….

a. 2 dan 4
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 1 dan 2
e. 3 dan 4

14. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali* ….
    a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
    b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
    c. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap peri kehidupan
    d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
    e. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa

15. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, *kecuali* ….
    a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
    b. Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
    c. Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
    d. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
    e. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan

16. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ….
    a. Penduduk
    b. Orang asing
    c. Warga negara
    d. Bukan penduduk
    e. Bukan warga negara

17. Pada dasarnya yang dapat membedakan antara warga negara dan bukan warga negara dapat ditinjau dari aspek, yaitu ….
    a. Haknya
    a. Legal formal
    b. Kewajibannya
    c. Hukum positif
    d. Hak dan kewajiban

18. Stelsel yang menyatakan bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan tindakan hukum tertentu adalah ….
    a. *Ius soli*
    b. Stelsel aktif
    c. Stelsel pasif
    d. Naturalisasi
    e. *Ius Sanguinis*

19. Hak yang dimiliki warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif) dinamakan ....
    a. *Ius soli*
    b. Hak opsi
    c. Hak repudiasi
    d. Naturalisasi
    e. *Ius sanguinis*

20. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ....
    a. Hak opsi
    b. *Ius soli*
    c. Hak repudiasi
    d. Naturalisasi
    e. *Ius sanguinis*

21. Seorang keturunan bangsa A (*ius soli*) lahir di negara B (ius *sanguinis*). Maka orang tersebut pada dasarnya ....
    a. *Ius soli*
    b. *Apatride*
    c. *Bipatride*
    d. *Ius sanguinis*
    e. Naturalisasi

22. Seorang keturunan bangsa B (*ius sanguinis*) lahir di negara A (*ius soli*). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ....
    a. *Ius soli*
    b. *Apatride*
    c. *Bipatride*
    d. *Ius sanguinis*
    e. Naturalisasi

23. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah ....
    a. Asas keterbukaan
    b. Asas kebenaran substantif
    c. Asas kepentingan nasional
    d. Asas perlindungan maksimum
    e. Asas publisitas asas publisitas

24. Hak untuk mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan ....
    a. Hak di bidang politik

b. Hak di bidang hukum
c. Hak di bidang ekonomi
d. Hak di bidang pendidikan
e. Hak di bidang sosial budaya

25. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….
    a. Memasuki anggota partai politik
    b. Membantu fakir miskin dan anak terlantar
    c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
    d. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
    e. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

26. Menurut UU Nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah, *kecuali* ….
    a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
    b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
    c. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
    d. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
    e. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah

27. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan ….
    a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
    b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
    c. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
    d. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
    e. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

28. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….
    a. Kekuatan utama sistem keamanan
    b. Kekuatan utama sistem pertahanan
    c. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
    d. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
    e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan

29. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….
    a. Menjadi prajurit TNI/Polri
    b. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
    c. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
    d. Mengikuti olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri
    e. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

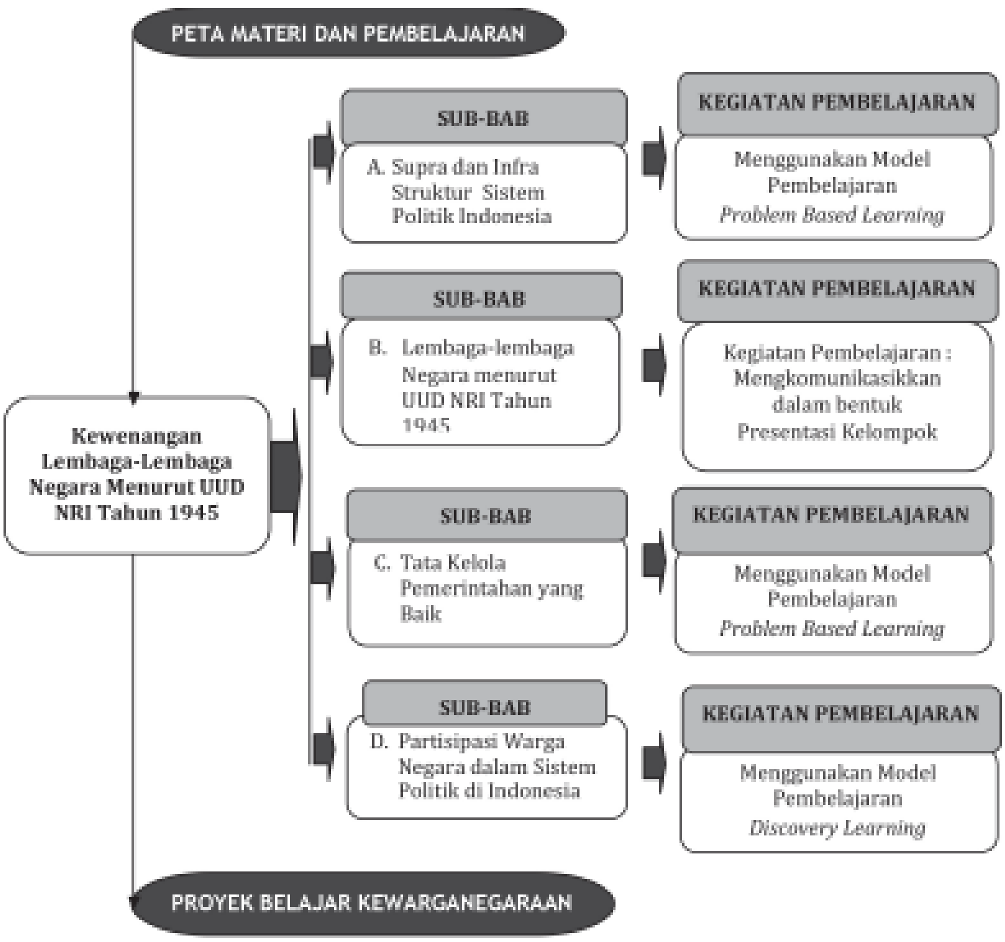
30. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ….
    a. Bela negara
    b. Sistem bela negara
    c. Pertahanan negara
    d. Sistem keamanan nasional
    e. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

B. Kunci Jawaban

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	11	D	21	B
2	A	12	E	22	C
3	A	13	A	23	C
4	A	14	D	24	D
5	C	15	D	25	A
6	D	16	C	26	E
7	D	17	E	27	A
8	D	18	B	28	D
9	D	19	B	29	C
10	E	20	E	30	A

Bab 3

Pembelajaran Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa.	1.3.1. Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara.	2.3.1. Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.3.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.3.1. Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia 3.3.2. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945 3.3.3. Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik 3.3.4. Menunjukan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3.1. Menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3.2. Mengomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Materi Pembelajaran Bab 3

Materi Pelajaran PPKn Kelas X Bab 3 adalah **Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,** dengan subbab sebagai berikut.

1. Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik Indonesia.
2. Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI. (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur.)

D. Proses Pembelajaran

1. PERTEMUAN PERTAMA

Pertemuan pertama materi Bab 3 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran pembelajaran materi Bab 2. Selain itu, juga untuk memberikan penguatan kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 2 relatif kurang berhasil (Remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

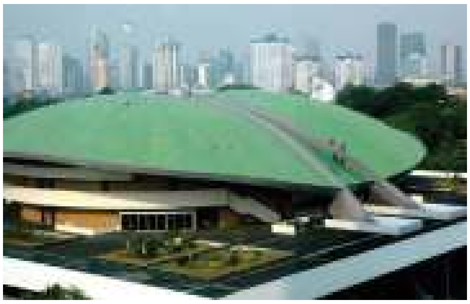
1) Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Mengidentifikasi Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Materi Pelajaran

1. Suprastruktur Politik Indonesia

Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.



Sumber: www.rmol.co

Gambar 4.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia

2. Infrastruktur Politik Indonesia

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Akan tetapi, jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan, sebagai berikut.

a) **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.

b) **Kelompok Kepentingan *(interests group)*,** yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

c) **Kelompok Penekan *(pressure group)*,** yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya, dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya.

d) **Media Komunikasi Politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah serta mengedarkan informasi.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning***, sebagai berikut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah (SMA). 3. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 4. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku Bab 3, Sub-bab A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Politik Indonesia. 5. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait dengan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Politik Indonesia. 6. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis nanti.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan antara 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut. - Kelompok Ganjil (Kelompok 1, 3, 5, dan 7) Analisis tentang Permasalahan dalam Infrastruktur Politik Indonesia. - Kelompok Genap (Kelompok 2, 4, dan 6) Analisis tentang Permasalahan dalam Suprastruktur Politik Indonesia. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan menuliskan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. a. Landasan hukum b. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 c. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara tersebut d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut 5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. a. Landasan hukum b. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 c. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara tersebut d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik tersebut. 3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok. 2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang *(powerpoint)* atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta preses berlangsungnya tugas kelompok. 2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saat kegiatan kerja kelompok berlangsung. (*Panduan Observasi Terlampir*).

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja Kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran di atas.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s/d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

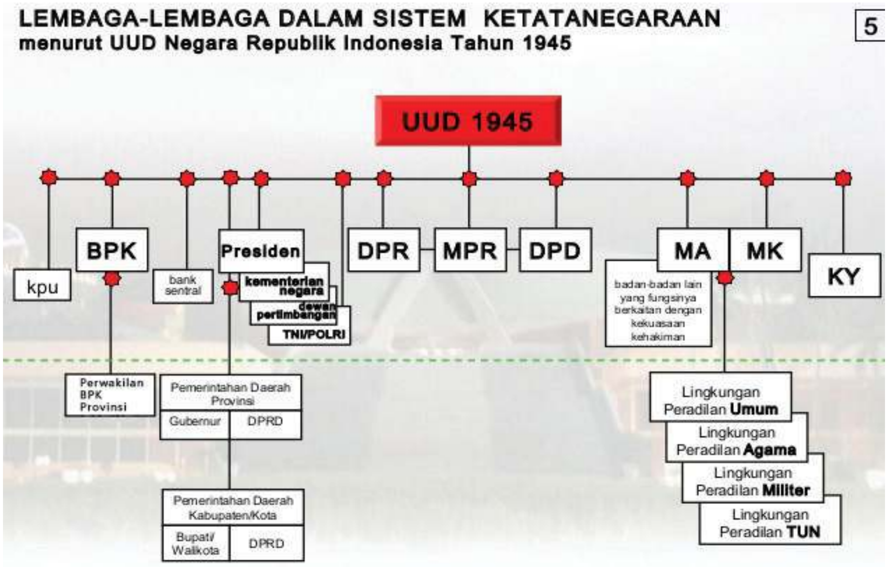
2. PERTEMUAN KEDUA

Pertemuan kedua akan membahas materi tentang Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran



Sumber: www.slideshare.net

Gambar 4.2 Bagan Lembaga-Lembaga dalam Sistem Ketatanegaraan

Garis besar tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**
   a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945)
   b. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota DPD dan berjumlah sebanyak 4 X Jumlah provinsi anggota DPD (UU No. 22 tahun 2003)
   c. MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
   d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 [1, 2, 3] UUD 1945)
   e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

2) **Presiden**
   a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A(1) UUD 1945).
   b. Syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang pasal 6 (2) UUD 1945 Amandemen.

c. Kekuasaan presiden meliputi menurut UUD 1945 amandemen adalah sebagai berikut.
   1) Membuat undang-undang bersama DPR (Pasal 5 [1] dan Pasal 20)
   2) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 [2])
   3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10)
   4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
   5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
   6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
   7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 [1])
   8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 [2])
   9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
   10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (Pasal 16)
   11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
   12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

3) **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**
   a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 [1] UUD 1945).
   b. Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU Nomor 22 tahun 2003).
   c. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 [1] UUD 1945).
   d. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A [2] UUD 1945).
   e. Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20A [3] UUD 1945).

4) **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
   a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara (Pasal 23E [1] UUD 1945).
   b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E [2] UUD 1945).

5) **Mahkamah Agung (MA)**
   a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 [2] UUD 1945).
   b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 [2] UUD 1945).

c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 [1] UUD 1945).

6) **Mahkamah Konstitusi (MK)**

a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan:
   1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
   3) Memutus pembubaran partai politik.
   4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C (1) UUD 1945)
   5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C [2] UUD 1945).

b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan presiden.



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gambar 4.3 Gedung Mahkamah Konstitusi adalah tempat masyarakat untuk mengadukan aspirasinya dalam masalah hukum dan landasan yuridis.

7) **Komisi Yudisial (KY)**

a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B (3) UUD 1945).

b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 (1) UUD 1945).

8) **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

a. DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.

b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.

c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU No. 22 tahun 2003).
d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan pembelajaran dalam bentuk presentasi kelompok. Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan sebagai berikut.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Guru menyampaikan topik tentang "Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945". 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (Kelompok 3 agar mempersiapkan kelompoknya).
Kegiatan Inti 1. Presentasi Kelompok 3, topik Bab 3, Sub-Bab B. Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945. 2. Pada saat Kelompok 3 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 3, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.

Deskripsi Kegiatan
<u>Penutup</u> 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas pada tugas mandiri tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Untuk memahami lebih jauh tentang makna sistem pemerintahan Republik Indonesia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

No	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
1	Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia	....

No	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	
2	Penjabaran *Trias Politika* dalam Sistem Pemerintahan RI	1. Legislatif .... 2. Eksekutif .... 3. Yudikatif ....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. PERTEMUAN KETIGA

Pertemuan ketiga akan membahas materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pertemuan ini dengan model pembelajaran *problem based learning*, peserta didik melakukan analisis mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang *solid* dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis sebagai berikut.

(a). Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
(b). Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
(c). Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut Laode Ida (2002), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.

(a). Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
(b) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan *output* yang berkualitas
(c). Proses penguatan diri sendiri *(self enforcing process),* dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah *(self governing)* dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
(d). Keseimbangan kekuatan *(balance of force),* di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development),* ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
(e). Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain sebagai berikut.

(1). Hubungan antara pemerintah dan pasar.
(2). Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.
(3). Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
(4). Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat).
(5). Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan/ pedesaan.
(6). Hubungan antara legislatif dan eksekutif.
(7). Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.

(1). Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan.

(2). Terwujudnya akuntabilitas publik, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(3). Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

(4). Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.

(5). Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui *(rights to information)* keputusan pemerintah terjamin.

c. Kegiatan Pembelajaran

Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik. 2. Guru menyampaikan topik tentang "Tata kelola Pemerintahan yang Baik".
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, guru dapat menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik.

Deskripsi Kegiatan
2. Guru memaparkan secara singkat tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas. 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang tata kelola pemerintahan yang baik. (Dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik.) 4. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik yang terdapat dalam Bab 3, buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X (Subbab D dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumber lainnya). 5. Peserta didik melakukan analisis tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 6. Secara random (1 s.d 2 orang) peserta didik dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan tata kelola pemerintahan yang baik dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saat kegiatan kerja kelompok berlangsung. (*Panduan Observasi Terlampir*).

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil kerja analisis tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis tata kelola pemerintahan yang baik (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengkomuniikasikan).

4. PERTEMUAN KEEMPAT

Pertemuan keempat akan membahas materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Materi Pelajaran

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah:

1. Di Lingkungan Sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut.

(a). Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya.
(b). Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
(c). Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

2. Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain adalah sebagai berikut.

(a). Forum warga.

(b). Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.

(c). Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan seperti berikut.

(1). Pancasila dan UUD RI 1945.

(2). Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang partai politk dan sebagainya.

(3). Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.

(4). Norma-norma sosial yang berlaku.

3. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut.

(a). Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden

(b). Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada)

(c). Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, harus menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

(a). Pancasila

(b). UUD RI 1945

(c). Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya

c. **Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model ***Discovery Learning*** berikut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)	Setiap warga negara wajib berpartisipasi aktif dalam sistem politik di Indonesia. Sebaliknya masih banyak warga negara yang bersifat apolitis dalam sistem politik di Indonesia.
Problem Statement (Pertanyaan/Identifikasi Masalah)	Peserta didik diminta mengemukakan sebanyak mungkin contoh-contoh kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) yang dilakukan warga negara. Kemudian dari kasus-kasus itu dipilih salah satu dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah yang disampaikan. Misal: Golongan Putih (Golput) dalam pemilihan umum disebabkan karena masyarakat kurang percaya terhadap hasil pemilihan umum.
Data Collection (Pengumpulan Data)	1. Peserta didik secara individu ditugaskan untuk mencermati kasus-kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) yang dapat ditemukan dalam kenyataan di masyarakat. Penemuan kasus-kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) yang dilakukan warga negara itu kemudian dipertentangkan dengan hak dan kewajiban warga negara di bidang politik yang seharusnya. Contoh pertentangan itu: - ***Kenyataan***: Di sekitar masih terdapat warga negara tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan unum. Seharusnya: setiap warga negara memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lain dalan pemilihan umum. - ***Kenyataan***: Di sekitar masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Seharusnya: setiap warga negara wajib membayar pajak.

	2. Menugaskan peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk merumuskan contoh-contoh kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) yang dilakukan warga negara yang nyata dengan yang seharusnya. Dari diskusi itu peserta didik diharapkan dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut. a. Siapakah atau dari kalangan warga negara manakah yang tidak berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum? b. Apakah yang menyebabkan seorang warga negara bersifat ***apolitis*** dalam sistem politik di Indonesia? 3. Setelah diskusi kelompok selanjutnya peserta didik secara individual ditugaskan membuat jawaban sementara (hipotesis) atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam diskusi kelompok. Hipotesis yang diharapkan dibuat peserta didik misalnya sebagai berikut. a. Warga negara yang tidak berpartisipasi aktif dalam sistem politik "apolitis" di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum adalah warga negara yang berasal dari kelompok masyarakat menengah yang lebih menyukai *status quo*. b. Hal yang menyebabkan seorang warga negara bersifat *apolitis* dalam sistem politik di Indonesia, di antaranya karena masyarakat kurang percaya terhadap hasil pemilihan umum. 4. Peserta didik ditugaskan melakukan wawancara kepada peserta didik lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat. Pertanyaan yang diharapkan misalnya: Apakah Anda pernah menemukan warga negara yang tidak berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum? Jika ada, menurut Anda apa faktor-faktor penyebab warga negara tersebut tidak ikut memilih (golongan putih) dalam pemilu? Bagaimana sikap Anda terhadap warga negara yang bersikap seperti itu?
Data Processing (Pengolahan Data)	Peserta didik ditugaskan merumuskan hasil wawancara secara kelompok dengan format sebagai berikut:

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Kasus</th><th>Faktor Penyebab</th><th>Akibat</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Verification

(Pembuktian)</td>
<td>Peserta didik secara kelompok membuat kesimpulan tentang: Sikap apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat membuat kesimpulan, misal: Data yang dikumpulkan dari wawancara ternyata mendukung hipotesis.

Secara individual menugaskan masing-masing peserta didik untuk mencocokkan hipotesisnya dengan kesimpulan yang berhasil dirumuskan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Generalization

(Menarik Kesimpulan / Generalisasi)</td>
<td>Peserta didik secara berkelompok merumuskan kesimpulan akhir seperti berikut.

- Seluruh warga negara seharusnya berpartisipasi aktif dalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum (ikut memilih dan tidak bersifat apatis atau golput).

- Warga negara yang tidak ikut berpartisipasi aktif (golput) dalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum tidak boleh menduduki jabatan sebagai aparatur pemerintahan (PNS) atau menuntut haknya kepada negara.</td>
</tr>
</table>

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan observasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saat kegiatan kerja kelompok berlangsung (*Panduan Observasi Terlampir*).

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok sebagaimana tersebut di atas (hasil analisis *discovery*).

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam bentuk portofolio hasil kerja kelompok (hasil analisis *discovery*).

UJI KOMPETENSI BAB 3



A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Perhatikan data berikut!
   (1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
   (2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
   (3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
   (4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
   (5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
   (6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

   Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….
   a. Nomor 1, 2, dan 3
   b. Nomor 3, 4, dan 5
   c. Nomor 2, 4, dan 6
   d. Nomor 3, 4, dan 6
   e. Nomor 4, 5, dan 6

2. Perhatikan data di bawah ini!
   (1). Lembaga Swadaya Masyarakat
   (2). Dewan Perwakilan Rakyat
   (3). Dewan Perwakilan Daerah
   (4). Komisi Pemberantasan Korupsi
   (5). Presiden dan Wakil Presiden
   (6). Mahkamah Konstitusi

   Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….
   a. 1, 2, 3 dan 4
   b. 1, 3, 4 dan 5
   c. 1, 3, 5 dan 6
   d. 2, 3, 5 dan 6
   e. 3, 4, 5 dan 6

3. *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.* Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….
   a. Pasal 1 ayat 6
   b. Pasal 2 ayat 6
   c. Pasal 5 ayat 1

d. Pasal 6 ayat 1
e. Pasal 6 ayat 2

4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
   a. Mahkamah Agung
   b. Mahkamah Konstitusi
   c. Dewan Perwakilan Rakyat
   d. Dewan Perwakilan Daerah
   e. Badan Pengawas Keuangan

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
   a. Mahkamah Agung
   b. Dewan Perwakilan Rakyat
   c. Dewan Perwakilan Daerah
   d. Dewan Pertimbangan Agung
   e. Badan Pengawas Keuangan

6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, …. *kecuali* ….
   a. Disiplin masyarakat rendah
   b. Kurang tegasnya penegak hukum
   c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
   d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan
   e. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

7. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktivitas. Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang *tidak* sesuai dengan UU tersebut adalah ….
   a. Rapat umum
   b. Mimbar bebas
   c. Arak-arakan
   d. Unjuk rasa
   e. Pawai

8. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan

mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….
   a. Pancasila
   b. UUD NRI tahun 1945
   c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
   d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
   e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….
   a. Adanya pemilu berkala
   b. Adanya supremasi hukum
   c. Adanya akuntabilitas politik
   d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
   e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ….
   a. Voting
   b. Kerja sama
   c. Sikap individual
   d. Musyawarah mufakat
   e. Sikap senasib sepenanggungan

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud *partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan,* dan *media komunikasi politik.*
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
4. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	E	6	D
2	D	7	C
3	D	8	D
4	B	9	D
5	D	10	D

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Pengertian sistem politik menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut. **a. David Easton** menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. **b. Robert A. Dahl** menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. **c. Jack C. Plano**, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. **d. Rusadi Kantaprawira**, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.	**4**
2	**a. Partai Politik,** yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.	**4**

No	Jawaban	Skor
	b. Kelompok Kepentingan *(interest group)*, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Contoh dari kelompok kepentingan serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya. **c. Kelompok Penekan *(pressure group)***, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya, dengan cara demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya. **d. Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.	
3	Mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR.	**3**

No	Jawaban	Skor
	Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.	
4	Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. a) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi. b) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. c) Proses penguatan diri sendiri *(self enforcing process),* di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah *(self governing)* dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. d) Keseimbangan kekuatan *(balance of force)*, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama. e) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.	**5**
5	Bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara! **1. Di Lingkungan Sekolah** Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut. a. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya. b. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.	**6**

No	Jawaban	Skor
	c. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. **2. Di Lingkungan Masyarakat** Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain adalah sebagai berikut. a. Forum warga. b. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya. c. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya **3. Di Lingkungan Negara** Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut. a. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden b. Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) c. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun	
SKOR TOTAL		**22**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{22} \times 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 3. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 3. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

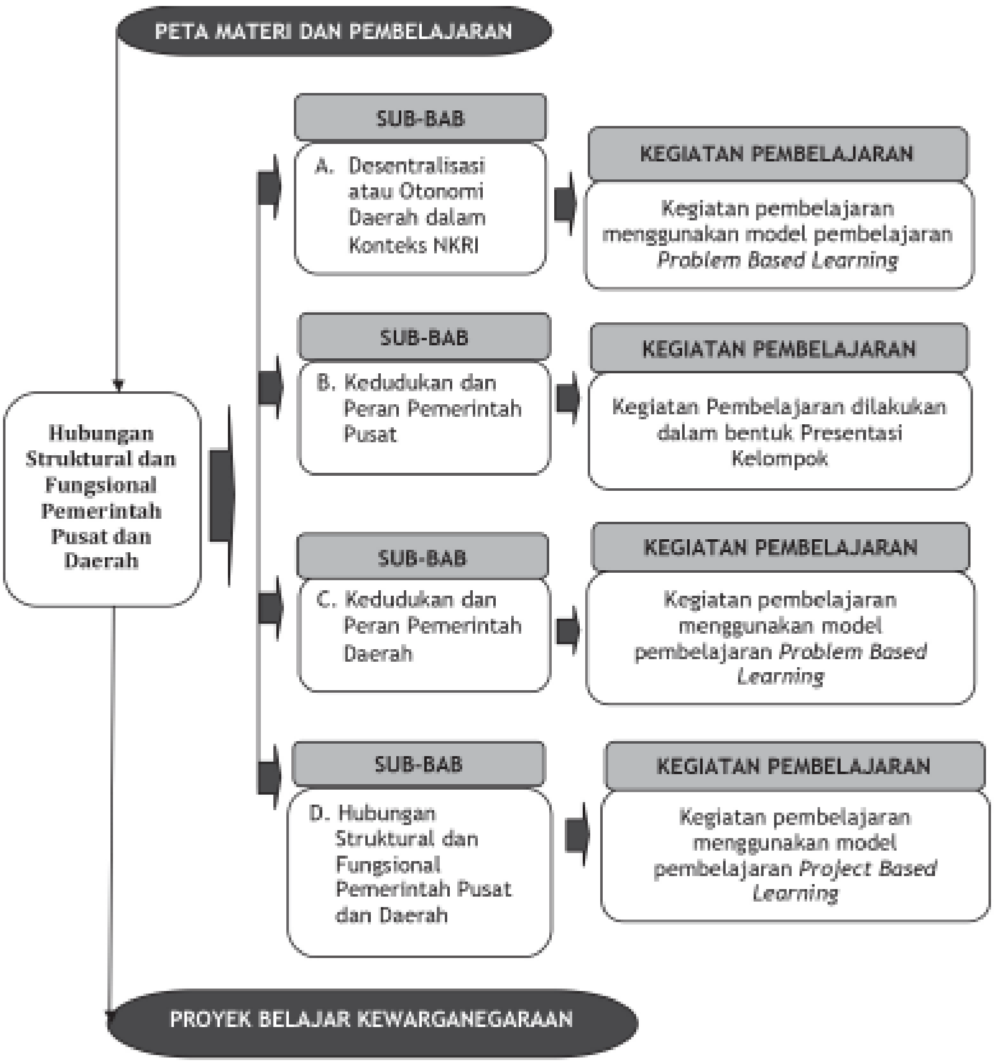
1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 3.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 3.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk portofolio atau ”Proyek Belajar Kewarganegaraan”.

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

Bab 4

Pembelajaran Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	1.4.1. Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.4.2. Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.4. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat.	2.4.1. Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	2.4.2. Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.4. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	3.4.1. Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.4.2. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat. 3.4.3. Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah 3.4.4. Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
4.4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.4.1 Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4.2 Mengomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Materi Pembelajaran Bab 4

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 4. adalah **Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah,** dengan subbab sebagai berikut.

1. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat.
3. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah.
4. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.)

D. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 4 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran pembelajaran materi Bab 3. Di samping itu, juga untuk memberikan penguatan kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 3 relatif kurang berhasil (remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menjelaskan konsep desentralisasi dan otonomi daerah.
3) Menganalisis permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah.
4) Menjelaskan makna desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
5) Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran

1. Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.



Sumber: http://dprd-ntbprov.go.id/dihujani-intrupsi-pada-rapat-paripuran-dprd-ntb/

Gambar 5.1 Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai perkembangan wilayahnya.

Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

(a). Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
(b). Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
(c). Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
(d). Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan.
(e). Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
(f). Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
(g). Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
(h). Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
(i). Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.



Sumber: http://nanaulana.blogspot.co.id/2012/02/kenangan-di-sma-negeri-31-jakarta.html
Gambar 5.2 Gedung sekolah merupakan fasiltas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi dengan maksimal.

(j). Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
(k). Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung.

Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

(a). Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
(b). Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
(c). Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
(d). Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
(e). Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dibagi tiga tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media serta buku yang diperlukan. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual dan sosial peserta didik. 3. Guru menyampaikan tujuan materi "Desentralisasi atau Otonomi daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia", dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik memahami desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru dapat menunjukkan ilustrasi/paparan/wacana tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Guru dapat memulai pelajaran dengan mengemukakan hakikat desentralisasi dan kelebihan serta kekurangannya. 2. Peserta didik disajikan wacana tentang tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah. 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca wacana tentang permasalahan sumber daya dan kemampuan daerah dalam penerapan otonomi daerah.

Deskripsi Kegiatan
4. Peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan tentang wacana tersebut (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 5. Peserta didik mengumpulkan informasi dari buku teks atau sumber lain yang relevan melalui media cetak/elektronik hal yang berkaitan dengan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Peserta didik membuat analisis diskusi dalam kelompok tentang desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik mengomunikasikan hasil analisi diskusi dalam kelompok tentang desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk komunikasi tulisan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sebagai umpan balik pembelajaran peserta didik ditugaskan melengkapi Tabel 4.2. Makna Otonomi Daerah di Indonesia. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Sebagai uji kompetensi (penilaian pengetahuan) dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik ditugasi untuk membuat 5 pertanyaan terkait dengan wacana tentang permasalahan sumber daya.

Pastikan komentar dan pertanyaan yang di tulis peserta didik ke dalam kolom di bawah ini berbeda dengan komentar dan pertanyaan yang diajukan kelompok lain.

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tabel 4.2
Makna Otonomi Daerah di Indonesia

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?	
2.	Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
3.	Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?	
4.	Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?	
5.	Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?	

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk portofolio hasil diskusi kelompok tentang makna negara kesatuan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua akan membahas tentang otonomi daerah dan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Dalam pertemuan ini peserta didik dapat melakukan analisis otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menjelaskan konsep otonomi daerah.
3) Menguraikan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Mengomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran

1. Otonomi Daerah

Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli di antaranya adalah sebagai berikut.

(a). ***C. J. Franseen***, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yag sudah dibuat dengannya.

(b). ***J. Wajong***, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.

(c). ***Ateng Syarifuddin***, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas yang merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

(d). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pasal 18 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (*Nanggroe Aceh Darussalam*) dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: http://bit.ly/1PcU578

Gambar 5.3 Otonomi khusus Provinsi Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001

c. Kegiatan Pembelajaran

Secara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi.

Deskripsi Kegiatan
2. Guru menyampaikan tujuan materi “Otonomi daerah dan Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan”. 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi, (Kelompok 4 diminta mempersiapkan kelompoknya).
Kegiatan Inti 1. Presentasi kelompok 4, topik Bab 4, Sub-bab A, pada Sub-bab 2 dan 3. 2. Pada saat kelompok 4 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi yang sedang dijelaskan (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 4, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diberi tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.3. Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia.

Diskusikanlah tentang makna desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan, dan kekurangan desentralisasi.

No.	NKRI	Rumusan Hasil Diskusi
1.	Makna Desentralisasi	....
2.	Makna Otonomi Daerah	....
3.	Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia	....
4.	Kelebihan Desentralisasi	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
5.	Kekurangan Desentralisasi	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan ini peserta didik dapat melakukan analisis kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan kali ini juga guru dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Mendeskripsikan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3) Menjelaskan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada otonomi daerah.
4) Menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
5) Menjelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
6) Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran

1. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut.

(a). Fungsi Pelayanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

(b). Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi pengaturan memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

(c). Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.

(1). Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
(2). Dana perimbangan keuangan.
(3). Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
(4). Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
(5). Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
(6). Konservasi dan standarisasi nasional.

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

(1). Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(2). Pemerataan dan keadilan.
(3). Menciptakan demokratisasi.
(4). Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
(5). Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasonal.

2. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (***medebewind***) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (*medebewind*) dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

(a). Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
(b). Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
(c). Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

(a). Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
(b). Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
(c). Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(d). Penyediaan sarana dan prasarana umum.
(e). Penanganan bidang kesehatan.
(f). Penyelenggaraan pendidikan.
(g). Penanggulangan masalah sosial.
(h). Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
(i). Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
(j). Pengendalian lingkungan hidup.
(k). Pelayanan pertanahan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.

2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut.
(a). Kapabilitas (kemampuan aparatur),
(b). Integritas (mentalitas),
(c). Akseptabilitas (penerimaan), dan
(d). Akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model ***Problem Based Learning***.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik kepada Allah SWT atas nikmat dan keberkahan yang diberikan kepada kita sekalian. 3. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 4. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Bab 4, Sub-Bab B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dan Sub-Bab C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. 5. Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh Pemerintah Pusat dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan antara 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut. - Kelompok Ganjil (Kelompok 1, 3, 5, dan 7) Analisis tentang permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah pusat - Kelompok Genap (Kelompok 2, 4, dan 6) Analisis tentang permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah daerah 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. a. Landasan hukum b. Kedudukan dan peran pemerintah pusat/ pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku c. Identifikasi 3 (tiga) permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia d. Solusi terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut. a. Landasan hukum b. Kedudukan dan peran pemerintah pusat/ pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	c. Identifikasi 3 (tiga) permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia d. Solusi terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah 2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah pusat/pemerintah daerah tersebut 3. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan hasil kajian kelompok 2. Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang *(powerpoint)* atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta preses berlangsungnya tugas kelompok. 2. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dilakukan dengan menggunakan observasi. Observasi terhadap peserta didik terkait dengan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik mengumpulkan hasil analisis dengan kelompok tentang suatu permasalahan yang terjadi pada penerapan otonomi daerah yang dialami oleh pemerintah pusat dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembembelajaran di atas.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan ini dilakukan dalam bentuk portofolio, peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompok tentang analisis permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

4. Pertemuan Keempat

Pertemuan keempat akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan ini peserta didik dapat melakukan analisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan kali ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3) Menjelaskan hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4) Menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5) Menyajikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Materi Pelajaran

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ***Cara pertama***, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. ***Cara kedua***, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

(a). Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.

(b). Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

(c). Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

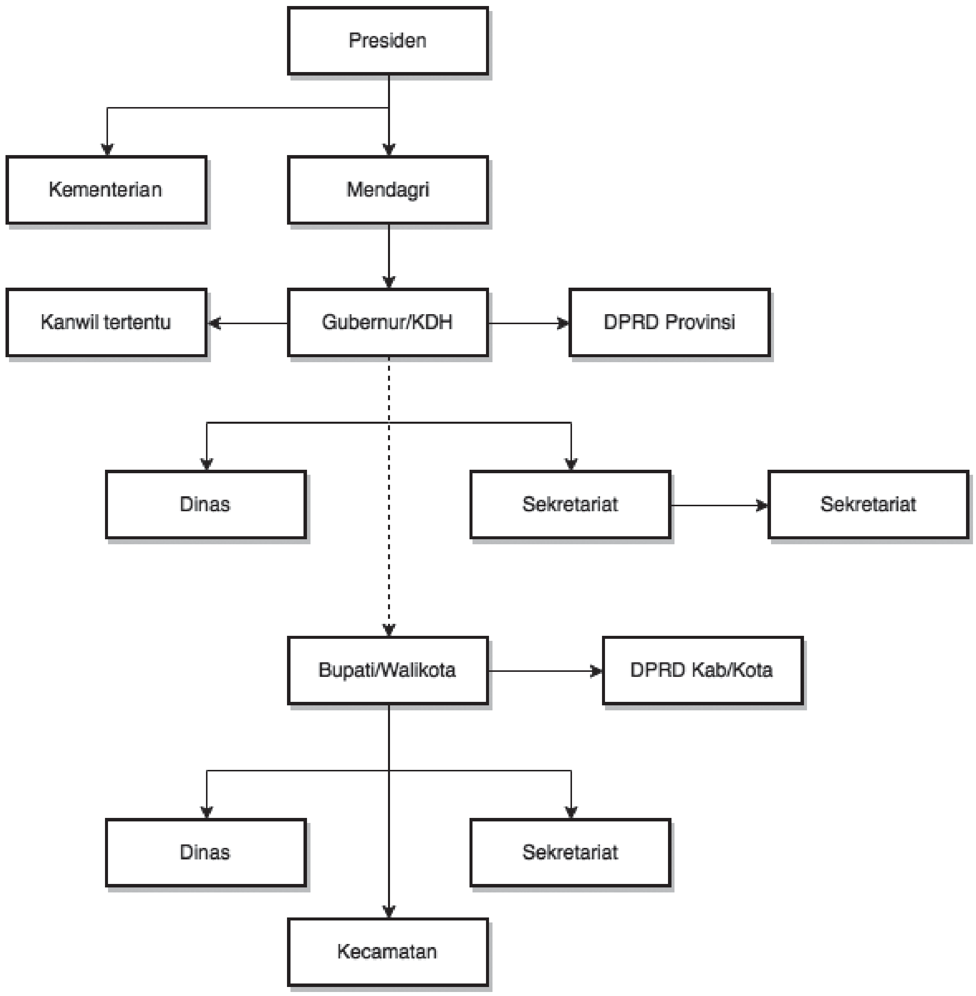
2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah tergambar pada bagan berikut.

Bagan Hubungan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber: dokumen kemdikbud
Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tidak kalah penting aspek sikap spiritual dan sosial peserta didik. 2. Guru menyampaikan tujuan materi Bab 4, Sub-bab D "Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembelajaran *inquiry.*
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guru memaparkan tentang konsep materi tersebut secara general. 2. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks pelajaran PPKn Sub-bab D materi Bab 4 atau materi yang relevan dari sumber lain (seperti website/internet/ media sosial/sumber lainnya). 3. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis dalam kelompok tentang topik materi Bab 4, Sub-bab D "Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". (dalam kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan mengumpulkan informasi terkait pencarian informasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dari sumber lain yang relevan). 4. Perwakilan kelompok (2 s.d 3 orang) menyampaikan hasil analisis diskusi dalam kelompok di hadapan peserta didik dari kelompok lain disertai dengan masukan, sanggahan, pertanyaan dari kelompok lain serta argumentasi kelompok penyaji (menanya). 5. Hasil analisis kelompok dalam bentuk tertulis dikumpulkan kepada guru.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan diskusi kelompok. 2. Sebagai refleksi, peserta didik dapat mengambil manfaat dari pembelajaran Bab 4 "Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah". 3. Sebagai umpan balik, peserta didik diminta untuk melengkapi Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dilakukan dengan menggunakan observasi. Observasi terhadap peserta didik terkait dengan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik ditugasi untuk menjawab/melengkapi pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diskusikan dengan kelompok tentang bagaimanakah hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian lengkapilah tabel berikut.

No	Hubungan	Rumusan Hasil Diskusi
1	Makna Hubungan Struktural	
2	Makna Hubungan Fungsional	

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan dalam bentuk Proyek Belajar Kewarganegaraan.

PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Peserta didik dengan kelompok berkunjung ke kantor RW yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal.

- Peserta didik melakukan wawancara dengan ketua RW tersebut, berkaitan dengan hal-hal berikut.
  1. Struktur organisasi RW
  2. Hubungan RW dan RT
  3. Tugas dan kewenangannya masing-masing.
- Peserta didik membuat laporan hasil wawancara yang ditandatangani oleh orang tua.

UJI KOMPETENSI BAB 4



A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ....
   a. dipilih oleh partai politik
   b. dipilih langsung oleh rakyat
   c. pengangkatan kepala daerah
   d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
   e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ....
   a. Peradilan/yustisi
   b. Politik luar negeri
   c. Kebijakan pendidikan
   d. Pertahanan dan keamanan
   e. Moneter dan fiskal nasional

3. Pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ....
   a. asas keterbukaan dan akuntabilitas
   b. asas otonomi dan tugas pembantuan
   c. asaa kepastian hukum dan demokrasi
   d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
   e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

4. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk ....
   a. Federal

b. Serikat
c. Monarki
d. Kesatuan
e. Negara bagian

5. Perhatikan data berikut:
   (1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
   (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
   (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
   (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
   (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

   Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….
   a. 1 dan 2
   b. 1 dan 3
   c. 1 dan 5
   d. 2 dan 4
   e. 2 dan 5

6. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah ….
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012

7. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....
   a. MPR
   b. DPR
   c. DPD
   d. DPRD
   e. Presiden

8. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ….
   a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah

b. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar
c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
d. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

9. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*eenheidstaat*), yaitu nilai ….
   a. nilai dasar
   b. nilai politik
   c. nilai unitaris
   d. nilai esensial
   e. nilai administratif

10. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip ….
   a. prinsip pemberdayaan
   b. prinsip kesatuan
   c. prinsip penyebaran
   d. prinsip keserasian
   e. prinsip tanggung jawab

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Jelaskan penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam penerapan otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jelaskan kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.
5. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	D
2	C	7	D
3	B	8	C
4	D	9	C
5	E	10	B

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

<table>
<tr><th>No</th><th>Jawaban</th><th>Skor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Negara kesatuan adalah negara dimana segala urusan kenegaraan dan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam praktiknya desentralisasi pada negara kesatuan Republik Indonesia dibedakan atas 3 (tiga) bagian.
1. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan, agama, dan sebagainya.</td><td>3</td></tr>
</table>

No	Jawaban	Skor
2	**Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya.	**3**
3	Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi.	**3**

No	Jawaban	Skor
	1) Fungsi Layanan (*Servicing Function*) Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya. **2) Fungsi Pengaturan (*Regulating Function*)** Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. **3) Fungsi Pemberdayaan** Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.	
4	***Pemerintahan daerah*** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.	**3**

No	Jawaban	Skor
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan.	
5	a. **Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah** Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. *Cara pertama*, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. *Cara kedua*, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah, sedangkan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.	4

No	Jawaban	Skor
	b. **Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah** Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.	
SKOR TOTAL		**16**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 4. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 4. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 4.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui penugasan dan uji kompetensi Bab 4.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas kelompok "Praktik Belajar Kewarganegaraan".

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			



PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER 1

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ….
   a. Infrastruktur politik
   b. Suprastruktur politik
   c. *Interest group*
   d. *Pressure group*
   e. *Political figures*

2. Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, *kecuali* ….
   a. Partai politik
   b. Lembaga negara
   c. Kelompok kepentingan (*interest group*)
   d. Kelompok penekan (*pressure group*)
   e. Pendapat umum (publik opini) bersama media massa

3. Perhatikan data berikut:
   (1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.
   (2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
   (3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
   (4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.
   (5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
   (6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.

   Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ….
   a. Nomor 1, 2, dan 3
   b. Nomor 3, 4, dan 5
   c. Nomor 2, 4, dan 6
   d. Nomor 3, 4, dan 6
   e. Nomor 4, 5, dan 6

4. Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....
   a. DPR dan MPR
   b. DPR dan DPD
   c. DPR dan DPRD
   d. DPD dan DPRD
   e. DPRD I dan DPRD II

5. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, *kecuali* ….
   a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan
   b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
   c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia
   d. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan
   e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah

6. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ….
   a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
   b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
   c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
   d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
   e. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik

7. Perhatikan data di bawah ini!
   (1). Lembaga Swadaya Masyarakat
   (2). Dewan Perwakilan Rakyat
   (3). Dewan Perwakilan Daerah
   (4). Komisi Pemberantasan Korupsi
   (5). Presiden dan Wakil Presiden
   (6). Mahkamah Konstitusi

   Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah ….
   a. 1, 2, 3 dan 4
   b. 1, 3, 4 dan 5
   c. 1, 3, 5 dan 6
   d. 2, 3, 5 dan 6
   e. 3, 4, 5 dan 6

8. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….
   a. Pasal 20 Ayat (1)
   b. Pasal 20 Ayat (2)
   c. Pasal 20 Ayat (3)
   d. Pasal 20 Ayat (4)
   e. Pasal 20 Ayat (5)

9. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi

dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….
a. Pancasila
b. UUD NRI Tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

10. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….
    a. Adanya pemilu berkala
    b. Adanya supremasi hukum
    c. Adanya akuntabilitas politik
    d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
    e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
    a. Mahkamah Agung
    b. Mahkamah Konstitusi
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Dewan Perwakilan Daerah
    e. Badan Pengawas Keuangan

12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranya terdapat di bawah ini ….
    a. sikap mental ditentukan dari atas
    b. banyak laporan fiktif/direkayasa
    c. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain
    d. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi
    e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu ….
    a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
    b. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
    c. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
    d. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
    e. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun

14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ….

a. Asas kepastian hukum
b. Asas kesamaan
c. Asas keseimbangan
d. Asas perlakukan yang jujur
e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang

15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ….
    a. akuntabilitas publik
    b. *public opportunity*
    c. *detoumement de pouvoir*
    d. *administratief beroep*
    e. *principle of legal security*

16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan ….
    a. Sentralisasi
    b. Desentralisasi
    c. Daerah otonom
    d. Otonomi daerah
    e. Tugas pembatuan

17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah ….
    a. Nomor 20 tahun 2005
    b. Nomor 3 tahun 2006
    c. Nomor 12 tahun 2006
    d. Nomor 12 tahun 2008
    e. Nomor 32 tahun 2014

18. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ….
    a. dipilih oleh partai politik
    b. dipilih langsung oleh rakyat
    c. pengangkatan kepala daerah
    d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
    e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

19. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ….
    a. asas keterbukaan
    b. asas kesejahteraan
    c. asas kepastian hukum

d. asas kepentingan umum
e. asas proporsionalitas

20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ….
    a. Peradilan/yustisi
    b. Politik luar negeri
    c. Kebijakan pendidikan
    d. Pertahanan dan keamanan
    e. Moneter dan fiskal nasional

21. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas ….
    a. pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi
    b. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi
    c. pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota
    d. pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota
    e. pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota

22. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….
    a. asas keterbukaan dan akuntabilitas
    b. asas otonomi dan tugas pembantuan
    c. asaa kepastian hukum dan demokrasi
    d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
    e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

23. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya ….
    a. Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah pusat ke daerah
    b. Memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    c. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom
    d. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang
    e. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah

24. Otonomi daerah pada masa Orde Baru belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang ….
    a. Efisiensi
    b. Sentralisasi
    c. Dekonsentrasi
    d. Otonomi daerah
    e. Tugas pembantuan

25. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus ….
    a. Lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat
    b. Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD
    c. Selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi
    d. Sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    e. Mempunyai kedudukan setara dengan peraturan perundangan pemerintah pusat

26. Perhatikan data berikut!
    1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
    2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
    3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
    4. Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
    5. Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

    Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….
    a. 1 dan 2
    b. 1 dan 3
    c. 1 dan 5
    d. 2 dan 4
    e. 2 dan 5

27. Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu ….
    a. Otonomi nyata
    b. Otonomi khusus
    c. Otonomi daerah
    d. Otonomi seluas-luasnya
    e. Otonomi bertanggung jawab

28. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah ….

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012

29. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi ….
    a. Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
    b. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
    c. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
    d. bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
    e. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas

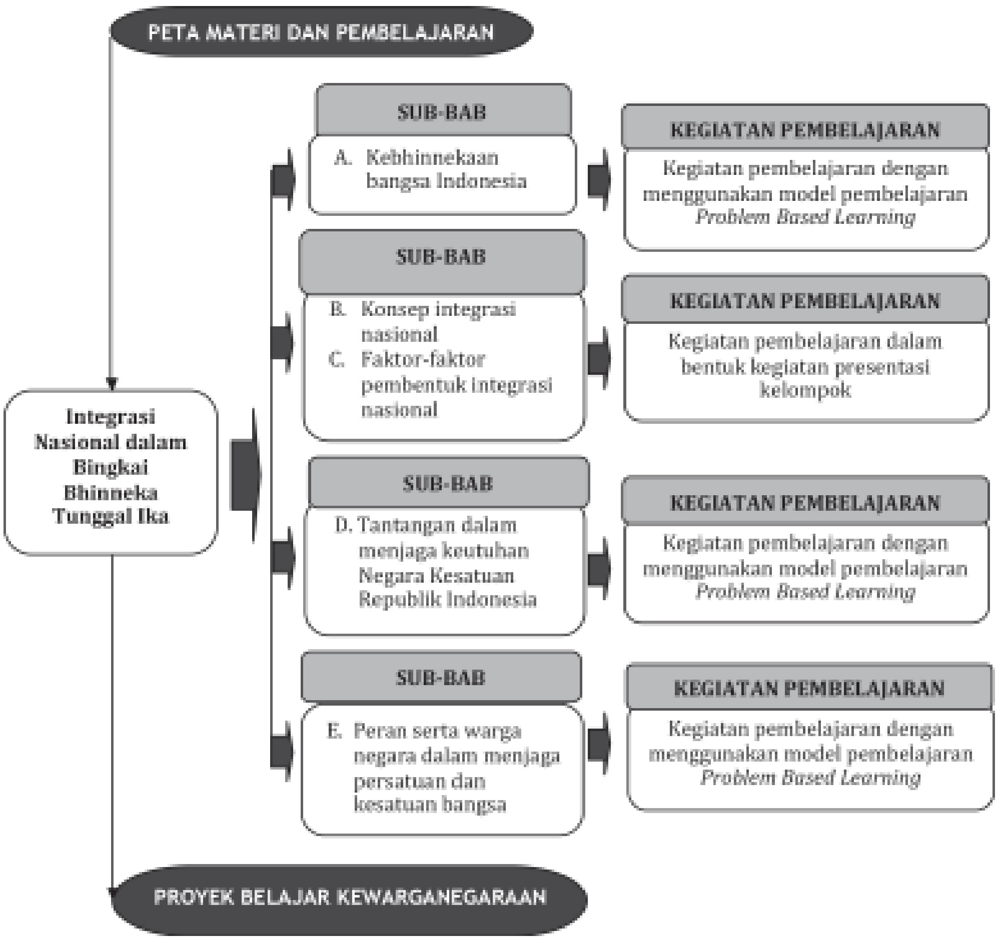
30. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ….
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. DPRD
    e. Presiden

B. Kunci Jawaban

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	11	B	21	A
2	B	12	E	22	B
3	E	13	A	23	D
4	B	14	B	24	C
5	B	15	A	25	C
6	A	16	D	26	E
7	D	17	D	27	A
8	A	18	B	28	D
9	D	19	B	29	B
10	D	20	C	30	D

Bab 5

Pembelajaran Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.	1.5.1. Membangun nilai-nilai toleransi yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 1.5.2. Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2.5. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.5.1. Membangun nilai-nilai toleransi yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 2.5.2. Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
3.5. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	3.5.1. Mengidentifikasi kebhinnekaan bangsa Indonesia 3.5.2. Menganalisis konsep integrasi nasional

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	3.5.3. Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional 3.5.4. Menganalisis membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 3.5.5. Menunjukkan kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara
4.5. Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	4.5.1 Menyajikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 4.5.2 Mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika

C. Materi Pembelajaran Bab 5

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab adalah **Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika,** dengan subbab sebagai berikut.

1. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
2. Konsep Integrasi Nasional
3. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
4. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
5. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.)

D. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 5 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran pembelajaran materi Bab 4. Selain itu, juga untuk memberikan penguatan

kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 4 relatif kurang berhasil (remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2) Mengidentifikasi Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika

b. Materi Pelajaran

Semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain.

1) Dasar negara Pancasila
2) Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan
3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan
4) Lambang negara Burung Garuda
5) Lagu kebangsaan Indonesia Raya
6) Lagu-lagu perjuangan

Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1) Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
2) Pergaulan antarsesama yang lebih akrab.
3) Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah.
4) Pembangunan berjalan lancar.

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain.

Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat.

Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti *berbeda-beda tetapi tetap satu*. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru menyampaikan topik tentang Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur atas karunia Allah SWT, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, sehat serta atas dasar keimanan terhadap Allah SWT. 4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik mengidentifikasi kebhinnekaan bangsa Indonesia, guru menunjukkan ilustrasi/paparan secara singkat tentang kebhinnekaan bangsa Indonesia.

Deskripsi Kegiatan
2. Peserta didik disajikan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca Buku Teks Bab 5. 4. Peserta didik membuat pertanyaan tentang Peta dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 5. Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebhinnekaan bangsa Indonesia. 6. Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi kebhinnekaan bangsa Indonesia. 7. Secara random peserta didik (1 sampai dengan 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang kebhinnekaan bangsa Indonesia. Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang kebhinnekaan bangsa Indonesia dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang kasus tersebut. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan topik tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan penugasan kepada peserta didik untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta menjawab Tugas Mandiri yang terdapat pada Tabel 5.1. Identitas Provinsi.

Coba kalian cari informasi di internet atau sumber lain tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.

Tabel 5.1. Identitas Provinsi

No	Nama Provinsi	Bahasa Daerah	Rumah Adat	Tarian
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Penugasan berikutnya adalah meminta peserta didik untuk diskusi bersama teman tentang sikap yang harus dilakukan dalam menjaga persatuan serta kesatuan negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Apa akibatnya jika tidak dilakukan dan bagaimana cara membiasakannya? Tuliskan hasil diskusi dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Sikap dan Komitmen Persatuan

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Komitmen Persatuan	Akibat dari Sikap Kurang Menerapkan Persatuan	Cara Membina dan Membiasakan Komitmen Persatuan
1. Keluarga			
2. Sekolah			
3. Masyarakat			
4. Bangsa dan Negara			

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis terkait dengan kebhinnekaan bangsa Indonesia yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua membahas materi tentang Konsep Integrasi Nasional. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2) Menganalisis konsep integrasi nasional
3) Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional
4) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

b. Materi Pelajaran

1. Pengertian Integrasi Nasional

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

(a). Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

(b). Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat para ahli tentang integrasi.

(1). Howard Wriggins

Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

(2). Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

Menurutnya, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal.

(3). **J. Soedjati Djiwandono**

Menurutnya, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.



Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/15/bentrok-antarwarga-terjadi-di-pesawaran-lampung

Gambar 6.1 Perbedaan pendapat diperbolehkan dan merupakan hak setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antaranak bangsa. Jika terjadi bentrok kita semua yang akan rugi.

2. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

(a). Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional

1) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
2) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
4) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.

(b). Faktor pendukung integrasi nasional

1) Penggunaan bahasa Indonesia.
2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.

(c). Faktor penghambat integrasi nasional

1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
2) Kurangnya toleransi antargolongan.
3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan pembelajaran dalam bentuk presentasi kelompok.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi 2. Guru menyampaikan topik tentang “Konsep Integrasi Nasional”. 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (Kelompok 5 agar mempersiapkan kelompoknya).
Kegiatan Inti 1. Presentasi Kelompok 5, topik Bab 5 Subbab B. Konsep Integrasi Nasional. 2. Pada saat Kelompok 5 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi dipaparkan oleh Kelompok 5, kelompok lain memberikan saran/ masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya).

Deskripsi Kegiatan
4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas mandiri yang terdapat pada Tabel 5.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional.

Tabel 5.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

No.	Lingkungan	Hak	Kewajiban
1.	Keluarga		
2.	Sekolah		
3.	Masyarakat		

Penugasan 2 adalah meminta peserta didik untuk mengisi tabel 5.4. Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional. Diskusikan dengan teman kalian tentang beberapa sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa.

Tabel 5.4. Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Menyebabkan Disintegrasi Nasional	Akibat dari Sikap dan Perilaku Tersebut	Alternatif agar Tidak Terulang
Keluarga			
Sekolah			
Masyarakat			
Bangsa			

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga akan membahas materi tentang membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan damai dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Materi Pelajaran

Kesadaran tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya.

Dengan demikian, berdasar tantangan tersebut visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Kemudian pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku Penasihat Presiden RI.

Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Dalam upaya itu ditempuh dengan tiga strata pendekatan, yaitu pertama, **strata mutlak**, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia; kedua, **strata penting**, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan (SARA), penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan ketiga, **strata pendukung**, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tetapi, jika input masyarakat secara intelektual, moral serta mental lemah, akan sangat sulit mewujudkannya.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik. 2. Guru menyampaikan topik tentang tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guru dapat menjelaskan berbagai macam tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Guru memaparkan secara singkat tentang bagaimana menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Peserta didik dalam kelompok diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara (dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik). 4. Peserta didik dalam kelompok diberi waktu untuk menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Bab 5, buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X Sub-bab D dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumber lainnya). 5. Peserta didik melakukan analisis tentang upaya untuk mengatasi berbagai macam tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Secara random (1 s.d 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis upaya mengatasi berbagai mcam tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang upaya membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara.

Deskripsi Kegiatan
2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan upaya membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dalam bentuk observasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya pada saat peserta didik mengerjakan tugas bersama kelompoknya.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, dimana peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok tentang Analisis upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

4. Pertemuan Keempat

Pertemuan keempat akan membahas materi tentang **Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.**

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai toleransi dan damai dalam rangka membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara
2) Menunjukkan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika

b. Materi Pelajaran

Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai serta mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah kesediaan para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan.

1. *Ancaman* adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.



Sumber: http://liputanislam.com/berita/yogya-juara-dua-daerah-intoleran-se-indonesia/

Gambar 6.2 Kita menolak kekerasan atas nama apa pun, karena kekerasan berdampak pada *disintegrasi* bangsa

Adapun, ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2. *Tantangan* adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.
3. *Hambatan* adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
4. *Gangguan* adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

Dengan demikian peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Menghormati, menghargai kemajemukan bangsa Indonesia, khususnya toleransi antar pemeluk umat beragama
2. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam perikehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
3. Bekerja sama dan bergotong royong antar anggota warga masyarakat

4. Berpartisipasi aktif dalam segala perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
   a. Pendidikan kewarganegaraan.
   b. Pelatihan dasar kemiliteran.
   c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau wajib.
   d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning***.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku BAB 5, subbab E tentang hal membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara 3. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca subbab tersebut. 4. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan 4 - 5 orang. 2. Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan menuliskan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Misalnya seperti:

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	a. Mengapa perlu adanya instrumen hukum yang melandasi kesadaran warga negara untuk bela negara? b. Bagaimana bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara? c. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara? 5. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu. Namun, peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. 2. Guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi dan menyelidiki tentang upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dalam kelompok. 3. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut di atas serta pemecahan masalah terhadap bagaimana upaya membangkitkan kesadaran bela negara pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. 4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya. 5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	1. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil kerja kelompok terkait dengan upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	2. Bentuk penyajian hasil karya berupa bahan tayang *(powerpoint)* atau laporan tertulis. 3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	1. Guru memberikan bimbingan agar peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi selama proses kerja kelompok pada saat menganálisis upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara serta bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya. 3. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan dalam bentuk observasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya pada saat peserta didik mengerjakan tugas bersama kelompoknya

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menganalisis dalam kelompok tentang upaya membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara sebagaimana tercermin dalam kegiatan pembelajaran di atas

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis upaya membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara (1 s.d 2 orang mewakili kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).



UJI KOMPETENSI BAB 5

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya ….
   a. komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
   b. komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
   c. komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
   d. komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
   e. komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah

2. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, *kecuali* ….
   a. Pembangunan berjalan lancar
   b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab
   c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang
   d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
   e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa

3. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena ….
   a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran
   b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam
   c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika
   d. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun
   e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

4. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan ….
   a. Adanya pemisahan TNI dan POLRI
   b. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa
   c. Negara Indonesia pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa
   d. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata
   e. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya

5. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, *kecuali* ….
   a. Pembangunan berjalan lancar
   b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab

c. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
e. Persatuan demi kebersamaan dan kepedulian kelompok tertentu

6. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah ….
   a. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
   b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
   c. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945
   d. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
   e. Dimasukannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

7. Syarat di bawah ini adalah syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu negara, *kecuali* ….
   a. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial
   b. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial
   c. Adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritarian
   d. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya
   e. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman

8. Pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban adalah ….
   a. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
   b. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan haknya
   c. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya.
   d. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
   e. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya

9. Faktor di bawah ini yang **bukan** merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, adalah ditandai dengan adanya ….
   a. persamaan dan kesetiakawanan yang agung antar pemeluk agama
   b. rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
   c. ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia
   d. tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda
   e. ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

10. Integrasi nasional akan berhasil jika antarkomponen bangsa dapat meminimalisir beberapa faktor penghambat dalam integrasi nasional, *kecuali* ….
    a. Kurangnya toleransi antargolongan
    b. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen
    c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar
    d. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan dalam perantauan di kota besar
    e. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Pada hakikatnya integrasi nasional mengandung arti menyatupadukan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Berdasarkan hal tersebut jelaskan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis!
2. Mengapa pada negara yang multikultural, seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan pendapat Anda!
3. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 3 (tiga) syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia!
4. Pada hakikatnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai komponen dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sebutkan 5 (lima) faktor pendukung suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia!
5. Pada hakikatnya dalam rangka pembentukan integrasi nasional, biasanya mengandalkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang secara etnis majemuk sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut sebutkan perbedaan faktor pendorong dan faktor penghambat tercapainya integrasi nasional!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	A	6	A
2	E	7	C
3	E	8	C
4	E	9	A
5	E	10	D

2. Kunci Jawaban Soal uraian

No	Jawaban	Skor
1	- Secara Politis Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. - Secara Antropologis Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.	**2**
2	Pada negara yang multikultural atau majemuk seperti Indonesia integrasi nasional menjadi prasyarat utama bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini disebabkan karena integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta pertahanan dan keamanan, di samping integrasi nasional juga dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik secara nasional, terutama konflik yang bersifat horisontal antara satu suku bangsa dan suku bangsa lainnya.	**3**
3	Ada 3 (tiga) syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.	**3**
4	Ada 5 (lima) faktor pendukung integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.	**5**

No	Jawaban	Skor
	4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.	
5	**Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional** 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. **Faktor penghambat integrasi nasional** 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antargolongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.	**4**
SKOR TOTAL		**23**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{23} X\ 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks pelajaran PPKn Bab 5. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 5. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

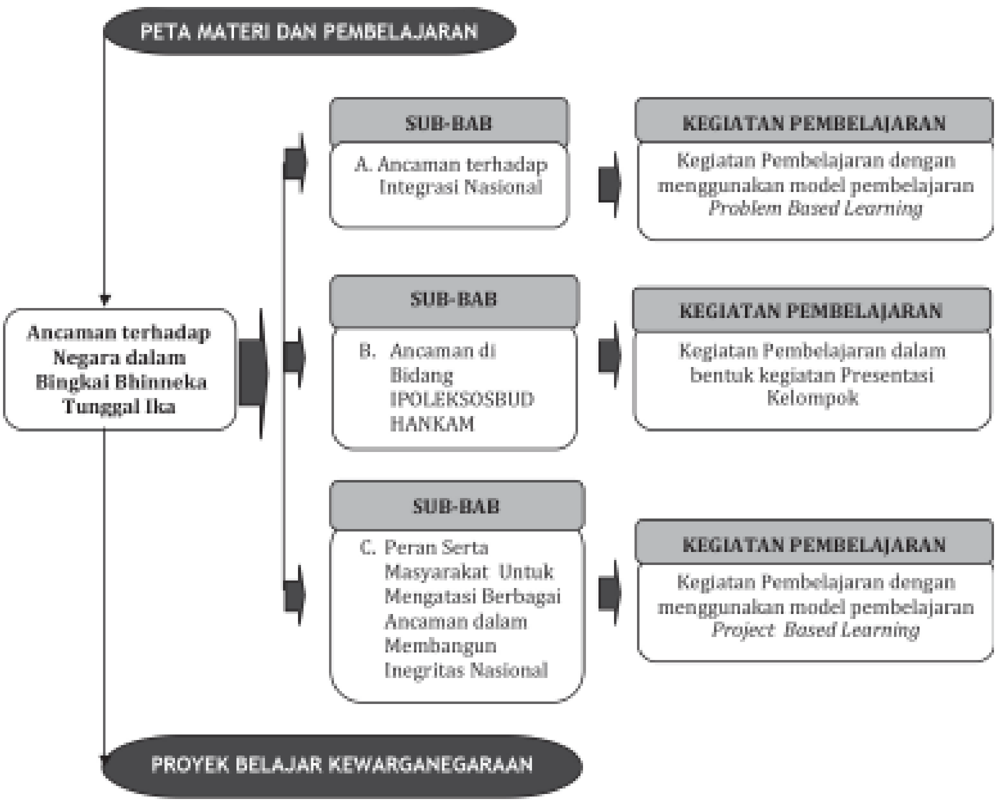
1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 5.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 5.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk ”Proyek Belajar Kewarganegaraan”.

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

Bab 6

Pembelajaran Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.6 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1.6.1. Membangun nilai-nilai kerja sama yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 1.6.2. Membangun nilai-nilai gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6.1. Membangun nilai-nilai kerja sama terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika

	2.6.2. Membangun nilai-nilai gotong royong terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai *BhinnekaTunggal Ika*
3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	3.6.1. Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional 3.6.2. Mengidentifikasi ancaman di Bidang IPLEKSOSBUDHANKAM 3.6.3. Menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional
4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.	4.6.1. Menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM 4.6.2. Mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

C. Materi Pembelajaran Bab 6

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 6 adalah **Ancaman terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika,** dengan subbab sebagai berikut.

1. Ancaman terhadap integrasi nasional.
2. Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur.)

D. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 6 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran

pembelajaran materi Bab 5. Di samping itu, juga untuk memberikan penguatan kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 5 relatif kurang berhasil (Remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai kerja sama dan gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika.
2) Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional.
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam.

b. Materi Pelajaran

1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Ancaman itu bisa dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan nonmiliter. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini diuaraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun nonmilter.

(a). Ancaman Militer

Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.



Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 7.1 Konvoi pasukan Belanda ketika melakukan Agresi Militer I kepada bangsa Indonesia.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.

Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup.

(b). Ancaman Nonmiliter

Ancaman nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antarbangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman nonmiliter di antaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

c. Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
<u>Pendahuluan</u> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sara syukur peserta didik atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga peserta didik masih dapat beraktivitas.

Deskripsi Kegiatan
4. Guru menyampaikan topik tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Namun sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu, terkait dengan sikap sosial 5. Peserta didik diminta untuk menganalisis tentang ancaman terhadap integrasi nasional.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional, guru menunjukkan ilustrasi/paparan secara singkat tentang ancaman terhadap integrasi nasional. 2. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks pelajaran tentang Bab 6 subbab A tentang mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional, baik ancaman militer dan ancaman nonmiliter. 3. Peserta didik membuat pertanyaan dari materi yang terdapat dalam subbab tersebut (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 4. Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan ancaman terhadap integritas nasional. 5. Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi ancaman terhadap integritas nasional, baik ancaman militer dan ancaman nonmiliter. 6. Secara random peserta didik (1 sampai dengan 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang ancaman terhadap integritas nasional. Adapun, peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang kasus Marsinah dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang kasus tersebut 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan penugasan kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 6.1. Setelah peserta didik membaca uraian materi ancaman militer, coba kamu prediksikan apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman militer tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan prediksimu pada bagian di bawah ini.

Prediksi saya apabila negara kita tidak dapat menanggulangi ancaman militer adalah :
....
....
....
....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

2. Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua akan membahas materi tentang konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai kerja sama dan gotong royong yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2) Mengidentifikasi ancaman di bidang *IPOLEKSOSBUDHANKAM*
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang *IPOLEKSOSBUDHANKAM*

b. Materi Pelajaran

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

1. Ancaman di Bidang Ideologi

Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual.

Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengaruh pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tesebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita mesti proaktif menyaring dampak negatif globalisasi.

2. Ancaman di Bidang Politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman nonmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan nonmiliter untuk menghadapinya.

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri.

3. Ancaman di Bidang Ekonomi

Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
2) Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
4) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.
5) Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk

4. Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.
3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya.
4) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
5) Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
6) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi 2. Guru menyampaikan topik tentang "Ancaman di Bidang Ipoleksosbudhankam". 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (Kelompok 6 agar mempersiapkan kelompoknya).
Kegiatan Inti 1. Presentasi Kelompok 6, topik Bab 6 Sub-bab B. Ancaman di Bidang Ipoleksosbudhankam 2. Pada saat Kelompok 6 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati).

Deskripsi Kegiatan
3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 6, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menjawab atau mengerjakan Tugas Mandiri 6.2. Setelah peserta didik membaca uraian materi ancaman nonmiliter di atas, coba minta agar peserta didik memprediksikan apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman nonmiliter tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Minta mereka menuliskan prediksinya pada bagian berikut ini.

Prediksi saya apabila negara kita tidak dapat menanggulangi ancaman non militer adalah :
....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. Pertemuan Ketiga dan Keempat

Pertemuan ketiga dan keempat akan membahas materi tentang peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dalam pertemuan ini dengan ***Model Pembelajaran Project Based Learning***, peserta didik melakukan melaksanakan observasi mengenai peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai kerja sama dan gotong royong yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika
2) Menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam .

b. Materi Pelajaran

Peran masyarakat akan timbul dalam bentuk sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas/ rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya.

Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah sebagai berikut.

1. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada, misalnya pada suku bangsa, budaya, dan adat istiadat daerah dan sebagainya
2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya
3. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman
4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional
5. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

6. Mau dan bersedia untuk berkerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat
7. Penggunaan segala fasilitas umum dengan baik
8. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
9. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib.
10. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
11. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah
13. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
14. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan pembelajaran dengan model ***Project Based Learning***. Kegiatan Proyek Belajar Kewarganegaraan dilaksanakan peserta didik dengan waktu selama 2 minggu. Secara detail Proyek Belajar Kewarganegaraan yang harus dilakukan peserta didik adalah sebagai berikut.

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Penentuan Pertanyaan Mendasar	1. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. a. Apakah makna disintegrasi bangsa dalam masyakat majemuk di Indonesia? b. Seberapa besarkah ancaman tersebut dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Indonesia? c. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh warga negara dan pemerintah dalam mencegah terjadi disintegrasi dan disharmonisasi dalam masyarakat Indonesia? d. Bagaimanakah peran aparat penegak/ pranata hukum dalam menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat?

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	2. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk peserta didik dan di mulai dengan sebuah investigasi mendalam. Topik atau tema yang akan menjadi bagian dalam Proyek Belajar Kewarganegaraan adalah **Peran "Masyarakat" untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Bangsa.** 3. Guru membagi peserta didik ke dalam 4 (empat) Kelompok Penugasan. a. Kelompok 1. Peran Keluarga b. Kelompok 2. Peran Sekolah c. Kelompok 3. Peran Karang Taruna d. Kelompok 4. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat *Catatan: Kelompok peserta didik dapat mengambil sub topik/ kajian yang sama, tetapi dengan tempat/wilayah yang berbeda* 4. Kemudian masing-masing kelompok mengajukan 1 (satu) pertanyaan mendasar sesuai dengan topik atau tema di atas yang akan dijawab secara kelompok dengan melakukan analisis atau kunjungan disertai wawancara kepada tokoh atau mengkaji dari berbagai sumber yang relevan dengan topik di atas. 5. Selanjutnya, usulan dari masing-masing kelompok dibahas, dimusyawarahkan, dan disepakai sebagai pertanyaan yang akan dijawab bersama melalui observasi lapangan.
Mendesain Perencanaan Proyek	1. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa "memiliki" atas proyek tersebut. 2. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	3. Pertanyaaan yang telah disepakati menjadi tugas/proyek kelas yang harus dijawab bersama. 4. Guru menyampaikan tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok, yaitu : **Kelompok 1** a. Bertugas untuk mendeskripsikan peran keluarga dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa. b. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan dalam keluarga guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat. c. Hal-hal apa sajakah yang harus dihindari oleh anggota masyarakat untuk mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat. d. Kerja sama yang bagaimanakah yang harus dilakukan anggota keluarga demi terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat. e. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan keluarga jika di dalam masyarakat telah terjadi disharmonisasi (tidak adanya kenyamanan dan keamanan). **Kelompok 2** a. Bertugas untuk mendeskripsikan peran sekolah dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa! b. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan dalam sekolah guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat dan dis-integrasi bangsa! c. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh warga sekolah guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat!

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	d. Kerja sama yang bagaimanakah yang harus dilakukan warga sekolah demi terciptanya integrasi bangsa! e. Upaya apa sajakah yang diharus dilakukan warga sekolah jika di dalam masyarakat telah terjadi disharmonisasi (tidak adanya kenyamanan dan keamanan). **Kelompok 3** a. Bertugas untuk mendeskripsikan peran remaja (Karang Taruna) dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa! b. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan remaja melalui Karang Taruna guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat dan disintegrasi bangsa! c. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh remaja (Karang Taruna) guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat! d. Kerja sama yang bagaimanakah yang harus dilakukan remaja (Karang Taruna) demi terciptanya integrasi bangsa! e. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan remaja (Karang Taruna) jika di dalam masyarakat telah terjadi disharmonisasi (tidak adanya kenyamanan dan keamanan). **Kelompok 4** a. Bertugas untuk mendeskripsikan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa! b. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat dan disintegrasi bangsa!

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	c. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat! d. Kerja sama yang bagaimanakah yang harus dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat demi terciptanya integrasi bangsa! e. Upaya apa sajakah yang diharus dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat jika di dalam masyarakat telah terjadi disharmonisasi (tidak adanya kenyamanan dan keamanan - Penyajian masalah dapat dilengkapi dengan grafik, peta, foto, judul surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lain yang berasal dari sumber bacaan, cetakan atau penerbitan. - Identifikasi sumber-sumber informasi juga ditampilkan seperti pakar, tokoh agama, lembaga pemerintah atau swasta dan lain-lain. - Produk yang harus dihasilkan untuk masing-masing kelompok ada dua yaitu berupa paparan tulisan dan paparan tayangan.
Menyusun Jadwal	1. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain adalah sebagai berikut. a) Membuat *timeline* (alokasi waktu) untuk menyelesaikan proyek, b) Membuat *deadline* (batas waktu akhir) penyelesaian proyek, c) Membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, d) Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan

TAHAP PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	e) Meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.
Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek	1. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. 2. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. 3. Guru melakukan monitoring dengan memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. 4. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
Menguji Hasil	1. Guru melakukan penilaian terhadap produk berupa dokumen tulisan dan tayangan. Paparan tulisan dan tayangan dinilai melalui kegiatan *showcase*/unjuk kasus. 2. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
Mengevaluasi Pengalaman	1. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. 2. Peserta didik menyampaikan perasaan dan pendapat setelah mengikuti pembelajaran (merefleksi).

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian, kerja sama peserta didik pada saat pelaksanaan proyek berlangsung, kemampuan menyampaikan argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik untuk mengumpulkan data selama observasi Proyek Belajar Kewarganegaraan

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil Proyek Belajar Kewarganegaraan termasuk laporan portofolio, dengan bentuk sebagai berikut.

Rubrik Penilaian Proyek

No	Tahapan	Skor
1	**Perencanaan** • Menyiapkan alat • Menyiapkan bahan	**1-5**
2	**Pengumpulan data** • Mencatat hasil pengamatan • Data sesuai dengan hasil pengamatan	**1-10**
3	**Pengorganisasian data** • Mengelompokkan data berdasarkan jenis indikator buatan	**1-5**
4	**Pengolahan data** • Menetapkan jenis indikator buatan	**1-5**
5	**Penyajian data** • Membuat laporan tertulis • Mempresentasikan hasil pengamatan	**1-10**
	Jumlah skor	**5-35**

UJI KOMPETENSI BAB 6



A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Pada hakikatnya kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena ….
   a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit
   b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali
   c. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional
   d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
   e. memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya

2. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan ….
   a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit
   b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali
   c. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional
   d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
   e. membuat bangsa Indonesia bangsa yang besar karena memiliki kekayaan yang melimpah

3. Posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, jika ditinjau dari aspek penduduk berada di antara ….
   a. ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
   b. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
   c. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
   d. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
   e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan

4. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia adalah ….
   a. terletak antara ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
   b. berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
   c. berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
   d. berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
   e. berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan

5. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek ideologi, dimana ideologi Pancasila berada di antara ….
   a. ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
   b. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
   c. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
   d. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
   e. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan

6. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek sistem pertahanan dan keamanan, dimana sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara ….
   a. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
   b. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
   c. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
   d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
   e. sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur

7. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila berada di antara ….
   a. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
   b. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
   c. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
   d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
   e. sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur

8. Usaha pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mengatasi ancaman yang datang dari luar dilaksanakan melalui ….
   a. sistem pertahanan sipil
   b. sistem keamanan oleh Polri
   c. sistem pertahanan negara oleh TNI
   d. mobilisasi segenap angkatan perang yang ada
   e. sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

9. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal di bawah ini, *kecuali* ….
   a. Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang
   b. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik
   c. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
   d. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO

e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

10. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, dalam bentuk ….
    a. Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang berasal dari luar
    b. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan sendi-sendi budaya nasional
    c. Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk yang menguntungkan negara
    d. Penyaring terhadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak pada ekonomi rakyat
    e. Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis dan memperkaya kebudayaan nasional

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Pada hakikatnya kebhinekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
2. Ancaman militer pada hakikatnya berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jelaskan dan berikan contoh terkait dengan ancaman di bidang militer!
3. Agresi suatu negara yang mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Jelaskan dan berikan contoh bentuk agresi yang berskala paling besar yang pernah dialami bangsa Indonesia!
4. Ancaman nonmiliter pada hakikatnya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Jelaskan hubungan antara ancaman nonmiliter dan pengaruh globalisasi!
5. Pada hakikatnya ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa dan separatisme. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	E	6	E
2	E	7	D
3	D	8	E
4	B	9	E
5	A	10	B

2. Kunci Jawaban Soal uraian

No	Jawaban	Skor
1	Kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu berpotensi meledak yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut.	**3**
2	Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.	**2**
3	Invasi pada dasarnya merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.	**2**

No	Jawaban	Skor
4	Ancaman nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman nonmiliter di antaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.	**3**
5	Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat dapat ditempuh melalui pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.	**2**
SKOR TOTAL		**12**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{12} X\ 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 6. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 6. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik . Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 6.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 6.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk "Proyek Belajar Kewarganegaraan".

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			

PERSIAPAN UJIAN TENGAH SEMESTER 2



A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Pada dasarnya konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti ….
   a. Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan
   b. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional
   c. Proses menyerasikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional
   d. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional
   e. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan

2. Faktor di bawah ini yang *bukan* merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah ….
   a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
   b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
   c. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat
   d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
   e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

3. Faktor di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah ….
   a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
   b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
   c. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia
   d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
   e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal ika

4. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya ….
   a. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
   b. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
   c. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
   d. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
   e. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dan semangat ukhuwah

5. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, *kecuali* ….
   a. Pembangunan berjalan lancar
   b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab
   c. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
   d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
   e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa

6. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena ….
   a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran
   b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam
   c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal ika
   d. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun
   e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

7. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah ….
   a. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
   b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
   c. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945
   d. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
   e. Dimasukkannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

8. Pada dasarnya integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
   a. John Locke
   b. Myron Weiner
   c. Howard Wriggins
   d. Nazaruddin Sjamsuddin
   e. J. Soedjati Djiwandono

9. Syarat di bawah ini adalah syarat keberhasilan suatu integrasi pada suatu negara, *kecuali* …
   a. Nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial
   b. Norma-norma dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.
   c. Adanya konsensus nasional dalam rangka kepemimpinan nasional yang otoritarian
   d. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya
   e. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman

10. Peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban ….
    a. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
    b. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan haknya
    c. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya.
    d. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
    e. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya

11. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara ….
    a. menjaga keselarasan antarbudaya
    b. menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu
    c. menjaga keserasian antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa
    d. menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu
    e. menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

12. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara, yang dikenal dengan ….
    a. Sistem *etatisme*
    b. Sistem monopoli
    c. Sistem oligopoli
    d. Sistem *markantilisme*
    e. Sistem *free fight liberalism*

13. Suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis, dinamakan ….
    a. Ancaman
    b. Tantangan
    c. Hambatan
    d. Gangguan
    e. Dorongan

14. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu ….
    a. Masyarakat
    b. TNI dan Polri

c. Tentara Nasional Indonesia
d. Kepolisian Republik Indonesia
e. Pertahanan Sipil

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, *kecuali* ....
    a. pendidikan kewarganegaraan
    b. pelatihan dasar kemiliteran
    c. pengabdian sesuai dengan profesi
    d. sistem pertahananan dan keamanan rakyat semesta
    e. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib

16. Pada hakikatnya kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena ....
    a. mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit
    b. membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali
    c. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional
    d. dapat menjadi ledakan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
    e. memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya

17. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia adalah ....
    a. terletak antara ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
    b. berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
    c. berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
    d. berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
    e. berada di antara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan

18. Posisi negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, demokrasi Pancasila berada di antara ....
    a. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
    b. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
    c. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
    d. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
    e. sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur

19. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong ....
    a. kewibawaan negara
    b. kerukunan antar umat beragama
    c. keselamatan masyarakat pedesaan

d. keselamatan masyarakat perkotaan
e. kehormatan pemimpin partai politik

20. Tempat di bawah ini adalah tempat yang harus dilindungi dari aksi sabotase, yaitu ….
    a. objek-objek vital nasional dan instalasi strategis
    b. daerah yang menjadi pusat hiburan masyarakat
    c. daerah wisata pantai Ancol dan pantai laut selatan
    d. objek-objek wisata pegunungan dan agro industri
    e. objek-objek hiburan nasional yang menjadi ikon daerah

21. Gangguan keamanan laut yang mengganggu dan mengancam aspek ekonomi nasional, yaitu ….
    a. *Terorisme*
    b. *Illegal logging*
    c. *Illegal fishing*
    d. *Global warming*
    e. *White coral crime*

22. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah ….
    a. memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan
    b. menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah
    c. pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral
    d. menolak salah satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU
    e. menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon

23. Pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang sosial budaya, yaitu ….
    a. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar
    b. sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang
    c. cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing
    d. memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial
    e. timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas

24. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya yaitu gaya hidup di mana kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi dan membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dinamakan …
    a. liberalisme
    b. hedonisme
    c. westernisasi
    d. konsumerisme
    e. indivudualisme

25. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya dalam bentuk meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting disebut ….
    a. liberalisme
    b. hedonisme
    c. westernisasi
    d. konsumerisme
    e. individualisme

26. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan adalah ….
    a. seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
    b. seluruh sumber daya manusia dan alam didayagunakan bagi upaya pertahanan
    c. orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
    d. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan
    e. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

27. Sistem pertahanan dan keamanan negara di mana gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan adalah ciri dari …
    a. Kerakyatan
    b. Kesemestaan
    c. Kewilayahan
    d. Sishankamrata
    e. Alutsista Negara

28. Hal yang **bukan** merupakan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik adalah ….
    a. Mengembangkan demokrasi politik
    b. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik
    c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
    d. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Jaringan Pengaman Sosial
    e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

29. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan ….
    a. Mengembangkan demokrasi politik
    b. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik
    c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
    d. perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
    e. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

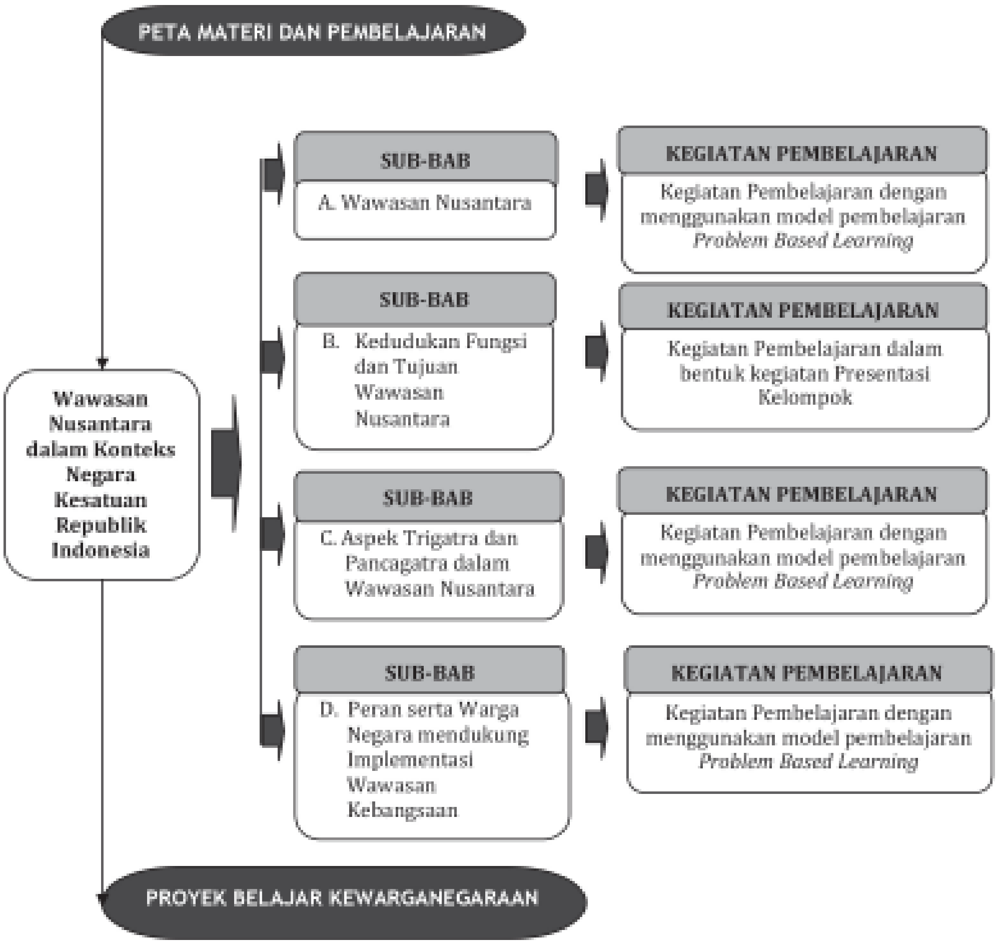
30. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia, dalam bentuk ….
    a. Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang berasal dari luar
    b. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan sendi-sendi budaya nasional
    c. Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk yang menguntungkan negara
    d. Penyaring terhadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak pada ekonomi rakyat
    e. Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis dan memperkaya kebudayaan nasional

B. Kunci Jawaban

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	D	11	A	21	C
2	C	12	A	22	B
3	C	13	A	23	D
4	A	14	B	24	B
5	E	15	D	25	C
6	E	16	E	26	C
7	A	17	B	27	C
8	D	18	D	28	D
9	C	19	A	29	D
10	C	20	A	30	B

Bab 7

Pembelajaran Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia



A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.7. Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.	1.7.1. Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.7.2. Membangun nilai-nilai peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.7. Bertanggungjawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2.7.1. Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.7.2. Membangun nilai-nilai peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.7. Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	3.7.1. Menganalisis Wawasan Nusantara 3.7.2. Mengidentifikasi fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara 3.7.3. Mengidentifikasi aspek trigatra dan pancagatra dalam Wawasan Nusantara

	3.7.4. Menunjukkan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan
4.7. Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4.7.1. Menyajikan hasil analisis tentang pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.7.2. Mengomunikasikan hasil analisis pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Materi Pembelajaran Bab 7

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 7 adalah **Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,** dengan subbab sebagai berikut.

1. Wawasan Nusantara
2. Kedudukan fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara
3. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
4. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. (Materi-materi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.)

D. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama

Pertemuan pertama materi Bab 7 merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaran pembelajaran materi Bab 6. Di samping itu, juga untuk memberikan penguatan kepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 6 relatif kurang berhasil (Remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Menganalisis hakikat Wawasan Nusantara
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Materi Pelajaran

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat:

(a). Menurut Prof. Wan Usman, "Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam."

(b). Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(c). Menurut kelompok kerja Lemhannas Wawasan Nusantara diusulkan untuk menjadi Tap. MPR, yang dibuat pada tahun 1999, yaitu "Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional."

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.



Sumber: http://www.idofficial.ga/lirik-lagu-satu-nusa-satu-bangsa-l-manik.xhtml

Gambar 8.1 Persatuan dan Kesatuan sebagai wujud Wawasan Nusantara

3. Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

(a). Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa

Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara "adu domba" dan "memecah belah" bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

(b). Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.

(c). Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.

(d). Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.

(e). Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

(f). Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Deskripsi Kegiatan
Pembukaan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2. Guru menyampaikan topik tentang konsep Wawasan Nusantara. Namun, perlu dikaji lebih dahulu tentang topik itu, terkait dengan sikap sosial. 3. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur peserta didik masih dapat mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT.

Deskripsi Kegiatan
4. Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik menganalisis konsep Wawasan Nusantara, guru menunjukkan ilustrasi/paparan secara singkat tentang konsep Wawasan Nusantara 2. Peserta didik diberi waktu untuk membaca Bab 7 Sub Bab A. Konsep Wawasan Nusantara 3. Peserta didik membuat pertanyaan tetang konsep Wawasan Nusantara (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). 4. Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konsep Wawasan Nusantara. 5. Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi konsep Wawasan Nusantara 6. Secara random peserta didik (1 sampai dengan 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang konsep Wawasan Nusantara Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang topik yang di bahas dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan bahasan. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan penugasan kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara

No.	Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Contoh Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Alasan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara
1.	Bidang Politik	Bidang Politik	Bidang Politik ....
2.	Bidang Hukum	Bidang Hukum	Bidang Hukum ....
3.	Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi ....
4.	Bidang Hankam	Bidang Hankam	Bidang Hankam ....

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan (1 s.d 2 orang perwakilan kelompok) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).

2. Pertemuan Kedua

A. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Mengidentifikasi kedudukan fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara

3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Materi Pelajaran

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

1. Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

2. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai berikut.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik. 2. Guru menyampaikan topik tentang “Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara”.
Kegiatan Inti 1. Sebelum peserta didik mengidentifikasi fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara, guru dapat menjelaskan bagaimana fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. 2. Guru memaparkan secara singkat tentang fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara 3. Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku teks pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara (dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik). 4. Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara yang terdapat dalam Bab 7, buku teks pelajaran PPKn Kelas X subbab B dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumber lainnya). 5. Peserta didik melakukan analisis tentang fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. 6. Secara random (1 s.d 2 orang mewakili kelompok) dapat mengomunikasikan secara lisan hasil analisis fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. **Penilaian**

1. **Penilaian Sikap**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. **Penilaian Pengetahuan**

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas tentang langkah-langkah untuk menerapkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dalam konteks Wawasan Nusantara di lingkunganmu.

3. **Penilaian Keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

3. Pertemuan Ketiga

Pertemuan ketiga akan membahas materi tentang Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Mengidentifikasi aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
3) Menyajikan dan Mengomunikasikan hasil analisis tentang pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Materi Pelajaran

1. **Aspek Trigatra Wawasan Nusantara**

(a). Letak dan Bentuk Geografis

Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT – 141 BT, yang di tengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

(b). Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Tiga faktor kependudukan yang sangat berpengaruh.

1. Kelahiran (Natalitas)
2. Kematian (Mortalitas)
3. Perpindahan (Migrasi)

(c). Keadaan dan Kekayaan Alam

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu:

1. Dapat diperbarui
2. Tidak dapat diperbarui

Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut.

a. Asas maksimal

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Asas lestari

Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.

c. Asas Berdaya saing

Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.



Sumber: http://http://www.nasional.sindonews.com

Gambar 8.2 Setelah ditetapkan oleh UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia, maka batik dapat berdaya saing dalam perdagangan.

2. Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara

a. Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai *guiding of principles* atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin.

b. Politik

Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan *input* (masukan) dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai *output* (keluaran). Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.



Sumber: http://bit.ly/1PnlLjp

Gambar 8.3 Pemilu dan Kampanye damai perwujudan Sistem politik Indonesia yang sehat berdasarkan demokrasi Pancasila

c. Ekonomi

Ekonomi kerakyatan harus menghindari *free fight liberalism,* etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antarwilayah dan antarsektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor nonteknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.

d. Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan,

dan gangguan (ATHG), baik dari dalam maupun dari luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.



Sumber: https://ibalibalibal.wordpress.com/2014/08/26/seni-dan-budaya-kalimantan-tengah/
Gambar 8.4 Adat Budaya Kalimantan

e. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata).

3. Hubungan Antargatra

Antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, artinya adalah sebagai berikut.

(a). Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan

kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (pancagatra).

(b). Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, terdapat saling hubungan antargatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).

(c). Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan, sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.

(d). Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu *resultante* keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya hubungan antargatra, dikemukakan seperti uraian berikut.

(1) Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.

(2) Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya.

(3) Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai berikut.

Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Guru menyampaikan topik tentang "Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara". 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yang telah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (Kelompok 7 agar mempersiapkan kelompoknya).
Kegiatan Inti 1. Presentasi Kelompok 7, topik Bab 7 subbab C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. 2. Pada saat Kelompok 7 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi (mengamati). 3. Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 7, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas (menanya). 4. Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia). Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipresentasikan. Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi. 2. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut. 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan penjabaran aspek Trigatra dan Pancagatra dalam konteks Wawasan Nusantara Indonesia.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

4. Pertemuan Keempat

Pertemuan keempat akan membahas materi tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. Dalam pertemuan ini dengan model pembelajaran *Problem Based Learning,* peserta didik melakukan analisis mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Indikator Pencapaian Kompetensi

1) Membangun nilai-nilai menghargai dan peduli pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Menunjukkan peran serta warga negara mendukung implementasi Wawasan Kebangsaan
3) Menyajikan dan mengomunikasikan hasil analisis tentang pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Materi Pelajaran

Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut.

1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat
2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.
5) Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
6) Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan Wawasan.Nusantara.

Dengan demikian, NKRI dan Wawasan Nusantara merupakan satu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional yang tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya.

c. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran ***Problem Based Learning***.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Orientasi peserta didik pada masalah	1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku BAB 7, subbab D. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. 3. Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam membaca subbab tersebut. 4. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin dapat dieksplorasi dari bacaan tersebut.
Mengorganisasi peserta didik untuk belajar	1. Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok heterogen beranggotakan antara 4 - 5 orang. 2. Guru meminta peserta didik secara berkelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan. 3. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 4. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar" sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 5. Selama penyelidikan peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. 6. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras. 7. Peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian masalah tersebut.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	1. Guru membantu peserta didik dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi tentang "Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara" **Kelompok 1** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. **Kelompok 2** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. **Kelompok 3** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	Kelompok 4 Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. **Kelompok 5** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. **Kelompok 6** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. **Kelompok 7** Implementasi Wawasan Nusantara ditinjau dari: a. Sikap warga negara terhadap Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan keamanan. b. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan keamanan. c. Faktor positif dan negatif dalam implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan keamanan.

SINTAK	DESKRIPSI KEGIATAN
	2. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut di atas dan pemecahan masalah jika terdapat kendala atau tantangan dalam implementasi Wawasan Nusantara di bidang yang masing-masing kelompok kaji. 3. Guru membimbing peserta didik atau kelompok untuk mencari informasi dan menyelidiki tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. 4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya. 5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.

d. Penilaian

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

2. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, yaitu menganalisis sebagaimana dalam kegiatan pembelajaran di atas, yaitu: Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan hasil analisis peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengomunikasikan).



UJI KOMPETENSI BAB 7

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut ….
   a. Geopolitik
   b. Geostrategi
   c. Wawasan Nusantara
   d. Wawasan kebangsaan
   e. Ketahanan nasional

2. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam ….
   a. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain.
   b. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
   c. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
   d. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaran negara di pusat dan daerah
   e. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

3. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, *kecuali* ….
   a. Pembangunan berjalan lancar
   b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab
   c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang
   d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
   e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa

4. Secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata yaitu "geo" yang berarti planet bumi dan "politik" yang berarti ….
   a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik
   b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik
   c. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial dan politik
   d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara
   e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain

5. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam ….
   a. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
   b. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelanggaran negara di pusat dan daerah
   c. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
   d. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
   e. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain

6. Pada hakikatnya Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian fungsi Wawasan Nusantara adalah ….
   a. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
   b. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasonal daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah
   c. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
   d. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
   e. Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

7. Pada hakikatnya Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian tujuan Wawasan Nusantara adalah ….
   a. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
   b. Mewujudkaan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasonal daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah
   c. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
   d. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
   e. Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

8. Pada hakikatnya Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan ....
    a. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
    b. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
    c. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta
    d. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
    e. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial

9. Asas Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah ....
    a. Keadilan
    b. Kejujuran
    c. Solidaritas
    d. Kerja sama
    e. Kesetiaan

10. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan ....
    a. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
    b. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
    c. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta
    d. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
    e. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial

B. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI?
2. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konsepsi Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia!

3. Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra dalam Wawasan Nusantara!
4. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan aspek pancagatra dalam Wawasan Nusantara!
5. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang ipoleksosbudhankam bagi bangsa Indonesia!

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	C	6	A
2	D	7	A
3	E	8	A
4	E	9	A
5	B	10	D

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	Pada dasarnya Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM) serta merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	**3**

No	Jawaban	Skor
2	Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsi Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, dan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Tujuan**, Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah	**3**
3	**Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara** **1) Letak dan Bentuk Geografis** Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT – 141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang ditengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. **2) Keadaan dan Kemampuan Penduduk** Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. **3) Keadaan dan Kekayaan Alam** Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain.	**3**

No	Jawaban	Skor
4	**Aspek Pancagatra dalam Wawasan Nusantara** **1. Ideologi** Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. **2. Politik** Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan *input* (masukan) dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai *output* (keluaran). Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. **3. Ekonomi** Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.	5

No	Jawaban	Skor
	4. Sosial Budaya Sosial budaya merupakan kondisi dinamis budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. **5. Pertahanan dan Keamanan** Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata).	

No	Jawaban	Skor
5	Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM. 1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman.	4
SKOR TOTAL		**18**

D. Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\textit{Skor yang diperoleh}}{18} \; X\ 100$$

PROGRAM REMEDIAL

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks pelajaran PPKn Bab 7. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

PROGRAM PENGAYAAN

Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 7. Selain itu, peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.

1. Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran Bab 7.
2. Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes, penugasan dan uji kompetensi Bab 7.
3. Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas individu ataupun kelompok juga dalam bentuk "Proyek Belajar Kewarganegaraan".

Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-Rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda Tangan			



PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER 2

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!

1. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia antara lain di bawah ini, *kecuali* ….
   a. Lagu-lagu perjuangan
   b. Dasar negara Pancasila
   c. Lambang negara Burung Garuda
   d. Lagu kebangsaan *Indonesia Raya*
   e. Lagu-lagu dan kesenian seluruh daerah di Nusantara

2. Integrasi nasional secara politis berarti ….
   a. Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan
   b. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional
   c. Proses menyerasikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional
   d. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional
   e. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan

3. Faktor di bawah ini yang **bukan** merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah ….
   a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
   b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
   c. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat
   d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
   e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

4. Faktor di bawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah ….
   a. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia
   b. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
   c. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia
   d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia
   e. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

5. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya ….
   a. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
   b. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
   c. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
   d. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
   e. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah

6. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, *kecuali* ….
   a. Pembangunan berjalan lancar
   b. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab
   c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang
   d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
   e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa

7. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena ….
   a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi
   b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam
   c. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika
   d. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun
   e. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

8. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan ….
   a. Adanya pemisahan TNI dan POLRI
   b. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa
   c. Negara Indonesia yang pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa
   d. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata
   e. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya

9. Pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh tanah air merupakan asas pembangunan nasional ....
   a. Adil dan merata
   b. Keselarasan
   c. Keterbukaan
   d. Keserasian
   e. Keseimbangan

10. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Hal yang termasuk ancaman di bidang militer yaitu ….
    a. Perdagangan narkoba
    b. Banyaknya tindakan korupsi
    c. Agresi, spionase, dan sabotase
    d. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
    e. Penangkapan ikan di laut secara ilegal

11. Ancaman di bawah ini yang **tidak** termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri adalah ….
    a. Agresi
    b. Spionase
    c. Gerakan separatis
    d. Aksi terror jaringan internasional
    e. Pelanggaran wilayah oleh negara lain

12. Pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah ….
    a. Atlet yang meraih juara nasional
    b. TIM SAR yang mengevakuasi korban
    c. Relawan yang mendonorkan jantungnya
    d. Siswa yang mengikuti upacara bendera
    e. Pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri

13. Landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu ….
    a. UU Nomor 3 Tahun 2001
    b. UU Nomor 2 Tahun 2002
    c. UU Nomor 3 Tahun 2002
    d. UU Nomor 2 Tahun 2003
    e. UU Nomor 3 Tahun 2003

14. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, *illegal fishing* merupakan salah satu ancaman terhadap ….
    a. Patriotisme
    b. Kedaulatan negara
    c. Ketenteraman negara

d. Keamanan Indonesia
e. Pertahanan Indonesia

15. Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa itu disebut negara ….
    a. Daratan
    b. Determinis
    c. Posibilitis
    d. Kepulauan
    e. Probabilitas

16. Negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan disebut negara ….
    a. Daratan
    b. Determinis
    c. Posibilitis
    d. Kepulauan
    e. Probabilitas

17. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut ….
    a. Geopolitik
    b. Geostrategi
    c. Wawasan Nusantara
    d. Wawasan kebangsaan
    e. Ketahanan nasional

18. Hakikat Wawasan Nusantara adalah ….
    a. Kesatuan dan keutuhan TNI dan POLRI
    b. Kesatuan rakyat dan pemerintah
    c. Kesatuan aspek politik dan sosial budaya
    d. Keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut dan udara
    e. Keutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional

19. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam ….
    a. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain
    b. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
    c. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
    d. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah
    e. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

20. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, *kecuali* ….
    a. Pembangunan berjalan lancar
    b. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab
    c. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang
    d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
    e. Terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku dan bahasa

21. Secara etimologis kata "geopolitik" terbentuk dari dua kata yaitu "geo" yang berarti planet bumi dan "politik" yang berarti ….
    a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik
    b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik
    c. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial, dan politik
    d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara
    e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain

22. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam ….
    a. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
    b. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelanggaran negara di pusat dan daerah
    c. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
    d. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
    e. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain.

23. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuh, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah ….
    a. Pengertian Wawasan Nusantara
    b. Hakikat Wawasan Nusantara
    c. Asas Wawasan Nusantara
    d. Fungsi Wawasan Nusantara
    e. Pentingnya Wawasan Nusantara

24. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional adalah ….
    a. Pengertian Wawasan Nusantara
    b. Hakikat Wawasan Nusantara
    c. Asas Wawasan Nusantara
    d. Fungsi Wawasan Nusantara
    e. Pentingnya Wawasan Nusantara

25. Fungsi Wawasan Nusantara adalah ….
    a. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rayat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
    b. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasonal daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah
    c. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
    d. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
    e. Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

26. Tujuan Wawasan Nusantara adalah ….
    a. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
    b. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah
    c. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
    d. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
    e. Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

27. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan ….
    a. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
    b. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
    c. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup atas karunia Sang Pencipta
    d. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
    e. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial

28. Asas Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah ….
    a. Keadilan
    b. Kejujuran
    c. Solidaritas

d. Kerja sama
e. Kesetiaan

29. Asas Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa keberanian berfikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar adalah ….
a. Keadilan
b. Kejujuran
c. Solidaritas
d. Kerja sama
e. Kesetiaan

30. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan ….
a. iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
b. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
c. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup atas karunia Sang Pencipta
d. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
e. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial.

B. Kunci Jawaban

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	E	11	C	21	E
2	D	12	B	22	B
3	C	13	C	23	C
4	C	14	B	24	C
5	A	15	B	25	A
6	E	16	C	26	A
7	E	17	C	27	A
8	E	18	E	28	A
9	E	19	D	29	B
10	C	20	E	30	D

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR PANDUAN OBSERVASI

Petunjuk

- Lembar observasi ini diisi oleh guru pada saat pelaksanaan pembelajaran.
- Observasi terhadap peserta didik dilaksanakan selama 1 (satu) semester.
- Guru dapat menentukan satu atau beberapa aspek sebagai indikator dalam pelaksanaan observasi.

Nama Sekolah : …………………………………………………………………

Kelas : …………………………………………………………………

No	Nama Peserta Didik	Sikap Spiritual dan Sosial											Deskripsi
		1. Jujur	2. Toleran	3. Menghargai	4. Kerja sama	5. Disiplin	6. Tg. Jawab	7. Proaktif	8. Responsif	9. Damai	10.Gt. Royong	11. Peduli	
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
dst													

Catatan :

- Untuk memudahkan penilaian sikap terkait dengan observasi; pada tahap awal guru dapat menetapkan bahwa seluruh peserta didik telah memenuhi kriteria aspek yang akan diobservasi. Hanya peserta didik yang berkecenderungan ekstrim ***sangat/kurang*** (+/-) yang dapat menjadi fokus observasi guru.
- Penilaian Observasi A (sangat baik), B (baik), C (cukup) dan K (kurang).

RUBRIK PENSKORAN

1. Jujur

No.	Indikator Kejujuran	Penilaian Kejujuran
1.	Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan.	Skor 1 jika 1 sampai 2 indikator muncul
2.	Tidak menjadi plagiat (mengambil/ menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas.	Skor 2 jika 3 sampai 4 indikator muncul
3.	Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya.	Skor 3 jika 5 indikator muncul
4.	Melaporkan barang yang ditemukan.	Skor 4 jika 6 indikator muncul
5.	Melaporkan data atau informasi apa adanya.	
6.	Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki.	

2. Toleran

No.	Indikator Toleran	Penilaian Toleran
1.	Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat.	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan jender.	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya.	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Dapat memaafkan kesalahan/ kekurangan orang lain.	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

3. Menghargai

No.	Indikator Menghargai	Penilaian Menghargai
1.	Menerima pendapat teman.	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Menerima perbedaan dengan dengan sesama teman.	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Dapat menjadi bagian dalam pergaulan dengan sesama teman.	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Dapat menjadi bagian solusi terhadap suatu permasalahan.	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

4. Kerja Sama

No.	Indikator Kerja Sama	Penilaian Kerja Sama
1.	Terlibat aktif dalam bekerja kelompok.	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan.	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan.	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Rela berkorban untuk teman lain.	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

5. Disiplin

No.	Indikator Disiplin	Penilaian Disiplin
1.	Sama sekali tidak bersikap disiplin selama proses pembelajaran.	Kurang (1)
2.	Menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten.	Cukup (2)
3.	Menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten.	Baik (3)
4.	Menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten.	Sangat baik (4)

6. Tanggungjawab

No.	Indikator Tanggung Jawab	Penilaian Tanggung Jawab
1.	Melaksanakan tugas individu dengan baik.	Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang konsisten ditunjukkan peserta didik
2.	Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan.	Skor 2 jika 2 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
3.	Mengembalikan barang yang dipinjam.	Skor 3 jika 3 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik
4.	Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.	Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan peserta didik

7. **Proaktif**

No.	Indikator Proaktif	Penilaian Proaktif
1.	Berinisiatif dalam bertindak.	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Mampu menggunakan kesempatan.	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Memiliki prinsip dalam bertindak (tidak ikut-ikutan).	Skor 3 jika terpenuhi tiga indikator
4.	Bertindak dengan penuh tanggung jawab.	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

8. **Responsif**

No.	Indikator Responsif	Penilaian Responsif
1.	Acuh (tidak merespons).	1 (Kurang)
2.	Ragu-ragu/bimbang dalam merespons.	2 (Cukup)
3.	Lamban memberikan respons/ tanggapan.	3 (Baik)
4.	Cepat merespons/menanggapi.	4 (Sangat Baik)

9. **Damai**

No.	Indikator Damai	Penilaian Damai
1.	Menghargai teman dalam setiap menjalankan aktivitas.	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Kebersamaan menjadi bagian dalam pergaulan.	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.	Skor 3 jika terpenuhi tiga indikator
4.	Menghindari konflik atau pertentangan dalam pergaulan.	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

10. Gotong Royong

No.	Indikator Gotong Royong	Penilaian Gotong Royong
1.	Saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok.	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
2.	Bersama-sama dalam mengerjakan tugas kelompok.	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
3.	Mengajak teman untuk membantu teman lain yang mengalami kesulitan.	Skor 3 jika terpenuhi tiga indikator
4.	Membagi pekerjaan/tugas berdasarkan *job description* yang telah disepakati.	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator

11. Peduli

No.	Indikator Santun	Penilaian Santun
1.	Menjadi bagian dalam setiap permasalahan.	Skor 4 jika terpenuhi semua indikator
2.	Suka membantu teman /orang lain.	Skor 1 jika terpenuhi satu indikator
3.	Ringan tangan terkait dengan kesusahan orang lain.	Skor 2 jika terpenuhi dua indikator
4.	Bagian terdepan dalam mengatasi setiap permasalahan.	Skor 3 jika terpenuhi tiga indikator

Lampiran 2

LEMBAR PENILAIAN SIKAP
PENILAIAN DIRI

Nama Peserta didik : ....

Kelas/Semester : X ….. / I

Indikator :

1. Memiliki motivasi selama proses pembelajaran dan menjelang ulangan harian.
2. Penguasaan materi yang akan diujikan.
3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
4. Menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok.
5. Menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi.
6. Menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah.

Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6, tulis masing-masing huruf (A/B/C/D) sesuai dengan pendapatmu jika: • A = Selalu • B = Sering • C = Jarang • D = Tidak pernah	
1	Saya memiliki motivasi selama proses pembelajaran dan kesiapan menjelang ulangan harian.
2	Saya menguasai materi Bab/Subbab yang akan diujikan dalam ulangan harian nanti.
3	Saya bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
4	Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok.
5	Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi.
6	Saya menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah.

Pedoman Penskoran:

Skor 4, jika A = Selalu, Skor 3, jika B = Sering, Skor 2, jika C = Jarang, dan Skor 1, jika D = Tidak pernah

$$\textbf{Skor Perolehan} = \frac{\textit{Jumlah Skor Perolehan}}{24}$$

Lampiran 3

LEMBAR PENILAIAN SIKAP
PENILAIAN ANTARPESERTA DIDIK (TEMAN)

Satuan Pendidikan : ....

Kelas : ....

Teman yang Dinilai : ....

Penilai : ....

Indikator:

1. Peserta didik tidak meniru (menyontek) hasil kerja teman ketika mengerjakan tugas.
2. Peserta didik tangguh dalam menyelesaikan masalah.
3. Peserta didik menunjukkan sikap kritis dalam diskusi kelompok.
4. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok.

Instrumen Penilaian

Petunjuk:
Berilah tanda chek (√) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi teman kamu.

No.	Aspek Penilaian	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
		4	3	2	1
1.	Peserta bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu.				
2.	Peserta didik meniru/menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan.				

No.	Aspek Penilaian	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
		4	3	2	1
3.	Peserta didik mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok.				
4.	Peserta didik menuntaskan tugas yang diberikan guru.				
5.	Peserta didik bertanya kepada teman ketika proses pembelajaran berlangsung.				
6.	Peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu.				
Jumlah					
Total Skor					

Keterangan:

- Tidak Pernah (intensitas sikap yang diamati tidak muncul)
- Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul)
- Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul)
- Selalu (intensitasnya sikap yang diamati selalu muncul)

Nilai = $\frac{Total\ Skor\ Perolehan}{24} \times 100$

Lampiran 4

LEMBAR PENILAIAN DISKUSI

Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh guru pada saat diskusi kelompok. Lembar ini mencatat keefektifan peserta diskusi dalam 4 (empat) kode nilai akhir, yaitu: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K (Kurang). Pada kolom Aspek Penilaian yang terdiri dari sikap, pendapat dan bahasa, tuliskan skor angka 0 - 100. Pada kolom Penilaian, tuliskan Rata-Rata Skor Angka dan konversi Kode Nilainya.

No	Nama Peserta didik	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Rata-rata Skor Angka	Kode Nilai

Keterangan:

1. Sikap : kesopanan, kerja sama, semangat, toleransi meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji.
2. Pendapat : rasional, teliti, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat.
3. Bahasa : jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar.

Peserta didik memperoleh nilai:

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
70 – 80	B (Baik)
50 – 69	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Lampiran 5

LEMBAR KINERJA PRESENTASI

Materi : ....

Kelompok : ....

No	Nama Peserta Didik	Kinerja Presentasi				Jml Skor	Nilai
		Kreativitas	Kebenaran Substansi	Penyajian Materi	Visual/ Grafis		
1							
2							
3							
4							
...							

Keterangan pengisian skor:

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
61 – 80	B (Baik)
50 – 60	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Keterangan :

NO	INDIKATOR	URAIAN
1	Kreativitas	Baru, unik, tidak asal berbeda
2	Kebenaran Substansi Materi	- Sesuai dengan konsep dan teori yang benar dari sisi keilmuan - Tidak ada bagian yang salah/keliru - Tidak ada kesalahan penempatan gambar, suara dan teks
3	Penyajian Materi	- Runtut sesuai dengan struktur keilmuan - Mengikuti alur logika yang jelas (sistematis) - Bervariasi
4	Grafis	- Tampilan layar (warna, tata letak/*layout*) - Ilustrasi

Lampiran 6

FORMAT PENILAIAN PRAKTIK KEWARGANEGRAAN

Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh guru atau teman selama proses penyusunan laporan oleh kelompok. Lembaran ini mencatat perilaku peserta didik secara perorangan. Pada kolom Aspek Penilaian yang terdiri dari sikap, pendapat dan bahasa, tuliskan skor angka 0 – 100 Pada kolom Penilaian, tuliskan Rata-Rata Skor Angka dan konversi Kode Nilainya.

Kelas : ....
Kelompok : ....
Topik : ....

No	Nama Peserta didik	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Rata-Rata Skor Angka	Kode Nilai
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

Keterangan:

1. Partisipasi: persiapan, keaktifan kerja dan tanggung jawab melaksanakan tugas
2. Sikap: menghargai pendapat orang lain, toleran, dan antusias dalam mengerjakan tugas bersama anggota tim lainnya
3. Kerja sama: koordinasi dengan teman, kesediaan untuk menolong orang lain dan tidak hanya terpaku pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Keterangan pengisian skor:

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
61 – 80	B (Baik)
50 – 60	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Lampiran 7

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai dokumen laporan hasil Praktik Belajar Kewarganegaraan. Pada akhirnya, peserta didik akan mendapatkan salah satu dari 4 (empat) kode nilai akhir berikut: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K (Kurang). Pada kolom Nilai, tuliskan skor angka 0 - 100 . Kemudian, tuliskan jumlah nilai pada kolom yang tersedia.

Kelas : ....
Kelompok : ....
Topik : ....

No	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
A	Menjelaskan Masalah		
	1. Kelengkapan		
	2. Kejelasan		
	3. Sumber		
	4. Data Pendukung		
	5. Grafis/Ilustrasi/Tabel		
	6. Dokumentasi		
B	Keaslian/Bukan Plagiat		
C	Sistematis dalam Laporan		
D	Penulisan Bahasa		
E	Tanda Tangan Orang Tua		
Jumlah			
Nilai			

Keterangan pengisian skor:

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
61 – 80	B (Baik)
50 – 60	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Lampiran 8

LEMBAR PENGAMATAN PRESENTASI HASIL PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN

Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai perilaku peserta didik dalam presentasi laporan Praktik Belajar Kewarganegaraan. Pada akhirnya, peserta didik akan mendapatkan salah satu dari 4 (empat) kode nilai akhir berikut: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K (Kurang). Pada kolom Nilai, tuliskan skor angka 0 - 100. Kemudian, tuliskan jumlah nilai pada kolom yang tersedia. Nilai Akhir didapat dengan rumus jumlah nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimum X 4. Konversikan Nilai Akhir tersebut ke dalam Kode Nilai A, B, C atau K.

Kelas : ....
Kelompok : ....
Topik : ....

No	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
1	Signifikansi (kebermaknaan informasi)		
2	Pemahaman terhadap materi		
3	Kemampuan melakukan argumentasi (alasan usulan, mempertahankan pendapat)		
4	Responsif (memberikan respon yang sesuai dengan permasalahan/ pertanyaan)		
5	Kerja sama kelompok (berpartisipasi, memiliki tanggung jawab bersama)		
Jumlah Nilai			
Nilai Akhir			

Keterangan pengisian skor:

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
61 – 80	B (Baik)
50 – 60	C (Cukup)
< 60	K (Kurang)

Lampiran 9

FORMAT PENILAIAN AKHIR

Petunjuk:

Format ini merupakan rangkuman penilaian untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Jumlah tugas/diskusi yang dinilai tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh guru. Jadi, pada akhir pembelajaran setiap bab, peserta didik akan mendapatkan nilai akhir beserta rincian dan catatan guru. Kemudian, peserta didik diminta menunjukkan format ini kepada orang tua untuk diberikan umpan balik dan paraf pada kolom yang tersedia.

Lembar ini dapat disalin atau diadaptasi oleh guru. Kemudian, sekolah sebaiknya menfasilitasi untuk penggandaannya sesuai kebutuhan.

Nama Peserta didik : ....

Kelas : ....

Materi/Bab : ....

Aspek yang Dinilai	Penilaian	
	Skor Angka	Nilai Kualitatif
1. Tugas Mandiri		
2. Tugas Kelompok		
3. Uji Kompetensi		
4. Penilaian Afektif (Spiritual dan Sosial)		
5. Praktik Belajar Kewarganegaraan		
Catatan perilaku peserta didik dalam menyelesaikan tugas/diskusi dari awal sampai akhir.		Total Skor ....
		Rata-Rata/Nilai Akhir ....

Tanda Tangan Orang Tua	....

GLOSARIUM

indikator perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran

jurnal catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku

kegiatan pembelajaran terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup

pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran *saintifik* (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengomunikasikan) kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut

kompetensi dasar kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran

kompetensi inti gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.

metode pembelajaran cara yang dilakukan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan

observasi teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati

penilaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

penilaian otentik proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mempu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai

penilaian antarpeserta didik teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu

penilaian diri teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap

penilaian portofolio penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik

penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/ waktu tertentu

penilaian unjuk kerja penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.

peserta didik anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus

sikap spiritual sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa

sikap sosial sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

tujuan pembelajaran gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar

INDEKS

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.

Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budimansyah,Dasim. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo

Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.

Busroh, Abu Daud. (2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darmodihardjo, Dardji. dkk. (1991). *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional,

Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung : Refika Aditama.

Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jimnung, Martin (2005). *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama.

Ismail, Taufik. (2004). *Katastrofi Mendunia; Marxisme, Leninisma, Stalinisma, Maoisme, Narkoba*. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.

Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,

Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Komalasari, Kokom. (2010). *Pembelajaran Konstekstual; Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.

Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.

Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Yudi.(2012). *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

_________. (1997). *Ketahanan Nasional.* Jakarta: PT Balai Pustaka.

Makarao,Mohammad Taufik. (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010*; Proses dan Realita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sinar Grafika.

________(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.* [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

________.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

________.(2012). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

_______.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

________(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

________.(2012). *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

________.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

________.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

________.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr. go.id. Html [12 September 2015].

________.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*.[*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2015].

Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.

Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.

Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*.Bandung: Yapemdo

Sanusi, Ahmad. (2006). *"Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.

Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simanjuntak, DH. (2011). *Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise*.[*Online*] Tersedia: http://www.repository.usu. ac.id. Html [14 November 2013]

Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Soekanto, Soerjono. (2002). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Somardi. (2007). *"Hukum dan Penegakan Hukum" dalam Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Sundawa, Dadang. (2007). *"Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia" dalam Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Suwardi, Harsono. dkk. (2002). *Politik Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.

Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Tim Penyusun. (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Sumber Gambar:

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, http://wapikweb.org/article/detail/AA-01161.php.

Diunduh tanggal 12 November 2015, http://bkd.surabaya.go.id/berita-detail.php?id_berita=20.

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.merdeka.com/uang/badan-pemeriksa-keuangan-ingin-rekrut-langsung-pegawai.html

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.merdeka.com/politik/siapa-menteri-yang-berani-berani-remehkan-presiden-jokowi.html

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://digilib.batan.go.id/psta/libpsta/

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://bantenexpres.com/front/br/apbd-perubahan-banten-capai-rp92-triliun

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.slideshare.net/majid66abdullah/nilai-nilai-pancasila-dan-proses-perumusan-pancasila

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=110&lvl1=4&lvl2=1&lvl3=3&kl=10

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, https://ajengrahmap.wordpress.com/2013/03/10/peta-wilayah-indonesia-wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-luar/

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://bit.ly/1PcP0eU

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://lampost.co/berita/sinergitas-tni-rakyat-jadi-kekuatan-bangsa

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.rmol.co/read/2015/04/15/199176/Konsep-Polisi-Parlemen-Memang-Masuk-Akal-

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.slideshare.net/SeriRodiah/presentasi-study-islam-asia-tenggara-2

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11740#.Vp24thFd1Y4

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://dprd-ntbprov.go.id/dihujani-intrupsi-pada-rapat-paripuran-dprd-ntb/

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://nanaulana.blogspot.co.id/2012/02/kenangan-di-sma-negeri-31-jakarta.html

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.menaranews.com/regional/28-maluku-papua/12460-majelis-rakyat-papua-deklarasikan-penyelamatan-tanah-dan-manusia-papua

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/15/bentrok-antarwarga-terjadi-di-pesawaran-lampung

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://liputanislam.com/berita/yogya-juara-dua-daerah-intoleran-se-indonesia/

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/180224/atraksi-beladiri-prajurit-cantik-tni-di-hut-kartini-007-debby.html

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://foto.tempo.co/read/beritafoto/12635/Jelang-Tahun-Baru-Kepolisian-Makassar-Gelar-Latihan-Pengamanan/6

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.idofficial.ga/lirik-lagu-satu-nusa-satu-bangsa-l-manik.xhtml

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.alux.com/these-20-amazing-photos-will-make-you-want-to-visit-indonesia/

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, http://www.merdeka.com/pemilu-2014/sambut-22-juli-dua-kubu-pendukung-capres-berdamai.html

Diunduh tanggal 19 Januari 2016, https://ibalibalibal.wordpress.com/2014/08/26/seni-dan-budaya-kalimantan-tengah/

Profil Penulis



Nama Lengkap : Tolib
Telp. Kantor/HP : 021-3142929/ 0816959150
E-mail : kasantholib@yahoo.com
Akun Facebook : kasantholib
Alamat Kantor : SMAN 68 Jakarta, Jalan Salemba Raya 18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian: Pendidikan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1997 – sekarang : Guru SMAN 68 Jakarta.
2. 1999 – sekarang : Dosen STAI Darul Qalam Tangerang Banten.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Program Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia, STIE IPWI Jakarta (1999-2001)
2. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Jurusan PMP-Kn IKIP Jakarta (1990-1995)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dasar-dasar Pendidikan (2002);
2. Administrasi Pendidikan, Teori dan Aflikasi (2004);
3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMA Kelas X, XI dan Kelas XII (2006).

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Lahir di Jakarta, 16 Agustus 1970. Menikah dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di Kota Tangerang Banten.

Nama Lengkap : Nuryadi, S.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 081322947774
E-mail : nanuryadi@gmail.com
Akun Facebook : Nuryadi
Alamat Kantor : Komplek BUPER Letjen. Purn. DR (HC). Mashudi – Kiarapayung- Sumedang 45366 SUMEDANG
Bidang Keahlian: Hukum dan Politik



Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1999 – 2009 : Editor buku pelajaran dan umum di PT. Grafindo Media Pratama.
2. 2009 – sekarang : Guru PPKn di SMKN Sukasari Sumedang.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2014-sekarang)
2. S1: Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1994-1999)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMA Kelas X,XI, dan XII (BSNP) (2010).

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 022-2013163/ 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. DR. Setiabudhi 229 Bandung
Bidang Keahlian: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1988 – sekarang : PNS (Dosen UPI di Bandung).
2. 2001 – sekarang : Pengembang Kurikulum di Direktorat PSMP.
3. 2015 – sekarang : Pengembang Panduan Tendik Berprestasi di Direktorat Tendik.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Prodi PKn di SPS UPI Bandung (2008-2011)
2. S2: Prodi IPS Pendidikan Dasar IKIP Bandung (1995-1997)
3. S1: Prodi PKn-Hukum IKIP Bandung (1981-1986)

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku IPS SD (2006);
2. PPKn SD (2006);
3. PPKn SMP;
4. PPKn SMA;
5. PKn SMP Kurikulum 2013;
6. PKn SMA Kurikulum 2013;
7. Materi dan Pembelajaran PKn;
8. Konsep Dasar PKn;
9. PPKn SMP Kurikulum 2013;
10. PPKn SMA Kurikulum 2013.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dampak Sertifikasi Guru Melalui Jalur Penilaian Portofolio Terhadap Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Guru Pkn Di Kota Bandung (2009);
2. Penyuluhan Hukum Dan Ham Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung (2009);
3. Membangun Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi (2010);
4. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision,* dan *Action*) Untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung (2013);
5. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (2013);

6. Pengembangan Model Penyuluhan AIDDA (*Awareness, Interest, Desire, Decision,* dan *Action*) Untuk Mengatasi Perilaku Menyimpang dalam Membuang Sampah Pada Kalangan Siswa di Bandung (2014);
7. Metode Pembelajaran Klik Berbasis *Mind Map* dalam Memanfaatkan Cara Kerja Otak Sebagai Mesin Asosiasi Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Pidana (2014);
8. Persepsi Dan Pemahaman Guru Peserta Plpg Ips Terhadap Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013 (2014);
9. Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui *Green Constitution* Dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Mahasiswa (2015);

Lahir di Indramayu, 15 Mei 1960, menikah dan dikarunia 2 anak, Saat ini menetap di Bandung, aktif di oeganisasi profesi AP3NKI. Terlibat di berbagai kegiatan di bidang pendidikan, seperti pengembang Kurikulum SMP di Direktorat PSMP, menyusun berbagai panduan tenaga pendidikan berprestasi di Dirjen GTK, beberapakali menjadi nara sumber nasional kurikulum 2013 dan Ke-PKn-an.

Nama Lengkap : Dr. Nasiwan, M.Si.,
Telp. Kantor/HP : 0274- 586168 ext.247/ 081578007988
E-mail : nasiwan3@gmail.com
Akun Facebook : Raden Nasiwan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Bidang Keahlian: Politik

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 2002 – 2016 : Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNY.
2. 2005 – 2015 : Reviewer Buku Ajar Puskurbuk.
3. 2015 - sekarang : Penelaah Buku PKn SMP SMA Puskurbuk.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2007-2014)
2. S2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (1999-2001)
3. S1: IKIP Negeri Yogyakarta (1990-1994)

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Teori-Teori Politik (Penerbit: Onbak Yogyakarta) (2012);
2. Dasar-dasar Ilmu Politik (Penerbit: Onbak Yogyakarta) (2013);
3. Filsafat Ilmu Sosial (Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY) (2014);
4. Indigenousasi Ilmu Sosial (Penerbit: Fistrans Institute FIS UNY) (2012);
5. Seri Teori Sosial Indonesia (Penerbit: UNY Press) (2016).

■ **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Model Pengembangan Ilmu Sosial Profetik (2014-2015);
2. Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (2015);
3. Pengaruh Diskursus Ilmu Sosial pada Dinamika Keilmuan Sosial di FIS UNY (2013-2014).

Lahir di Tambak, 17 April 1965. Saat ini menetap di Yogyakarta. Aktif di organisasi HISPISI (Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia).

Nama Lengkap : Dr. Kokom Komalasari, M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 022-2013163/ 08122174034
E-mail : komsari36@yahoo.co.id
Akun Facebook : komsari36@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Departemen PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Gedung FPIPS Lt. 2. UPI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. 40154
Bidang Keahlian: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

■ **Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:**

1. 2001 – sekarang : Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
2. 2012 – 2014 : Anggota Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pendidikan Indonesia.
3. 2010 - sekarang : Instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
4. 2011 - sekarang : Penilai Buku Non Teks Pelajaran bidang Pendidikan Kewarganegaraan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.

■ **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S3: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan/Universitas Pendidikan Indonesia (2005-2009)
2. S2: Sekolah Pascasarjana/Program Studi Pendidikan Luar Sekolah/IKIP Bandung (1996-1999)
3. S1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/ Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan/ IKIP Bandung (1990-1995)

■ **Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):**

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs dan SMA/MA, Penerbit Swasta di Bandung;
2. *Building Civic Competences in Global Era Through Civic Education: Problem and Prospect*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (2009);

3. Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia (2011).

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Penerapan Model *Controversial Issues* di kelas XII-IPA 1 SMAN 1 Lembang Kabupaten Bandung (2007);
2. Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus pada Yayasan Sosial Purna Karya Kota Bandung) (2007);
3. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP di Jawa Barat (2009);
4. Resosialisasi Anak Jalanan (Studi pada Rumah Singgah di Kota Bandung) (2009);
5. Manajemen SDM-Dosen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di UPI (2010);
6. Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity* untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa (2011);
7. Nilai-Nilai dalam Cerita Silat *Kho Ping Hoo* dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter (2011);
8. Pengembangan Karakter Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis *Living Values Activity* (2012);
9. Penggunaan Wayang Golek sebagai Sumber Belajar IPS untuk Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Siswa SMP (2012);
10. Model Integrasi *Living Values Education* dalam Perkuliahan untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2012);
11. Implementasi Pendidikan Karakter dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (2012);
12. Model Pembelajaran PKn Berbasis *Living Values Education* untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2013);
13. Model Pembelajaran PKn Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Mahasiswa (2013);
14. Pengembangan *Living Values Education* dalam Pembelajaran, Habituasi, dan Ekstrakurikuler untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik (multitahun, 2013-2014);
15. Model Pembelajaran Indiginasi dalam IPS untuk Pengembangan Wawasan Multikultural Mahasiswa (2013);
16. Bahan Ajar PKn Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan (Living Values) untuk Mengembangkan Karakter Mahasiswa (2014);
17. Analisis Kebutuhan Kurikulum Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada PKn terintegrasi (2015);
18. Pengembangan Multimedia Interaktif dalam pembelajaran PKn Berbasis Nilai Untuk Permbentukan Karakter Mahasiswa (2015);
19. Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Berbasis *Living Values Education* untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik (mulltitahun, 2015-2016);
20. Pengembangan Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Buku Teks Sejarah Indonesia SMA/MA (mulltitahun, 2015-2016).

Lahir di Tasikmalaya, 01 Oktober 1972. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Saat ini menetap di Bandung. Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, diantaranya mengikuti program *Short Overseas Elementary Education Training Program* di Huazhong Normal University,

China (2010), peneliti bidang pembelajaran PKn dan pendidikan karakter (UPI, DP2M Dikti Kemendikbud, dan Kemenristek dan Dikti), penulis artikel jurnal nasional dan internasional, penyaji dalam seminar nasional dan internasional, diantaranya *The 3th World Conference on Teaching Learning and Educational Leadership*, Brussels, Belgia (2012), instruktur dalam berbagai workshop terkait Pembelajaran PKn (metode/model, media, dan penilaian), penulis buku referensi, diantaranya "Pembelajaran Kontekstual", dan penulis buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan SMA (2007).

Nama Lengkap : Drs. Ekram Pawiroputro,M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 0274.548202/ 08122691251
E-mail : ekrampawiroputro@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Kampus FIS – UNY, Karangmalang, Yogyakarta
Bidang Keahlian: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Pembantu Dekan III – FIS – UNY.
2. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di FISE-UNY, Poltekkes Keperawatan.
3. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FIS-UNY, Poltekkes Keperawatan, Fakultas Ekonomi-UNY.
4. Pengampu Mata Kuliah Pengajian Kurikulum dan Buku Teks PKn SMP dan SMA di Jurusan PKnH – FIS UNY.
5. Pengampu Mata Kuliah Hukum INternasional di FIS UNY.
6. Pengampu Mata Kuliah Organisasi Internasional di Jurusan PKnH FIS-UNY dan pada Prodi PPKn – FKIP-UAD Yogyakarta.
7. Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PPKn-Prodi PGSD-FKIP-UAD.
8. Pengampu Mata Kuliah Praktik Pembelajaran PPKn Prodi PGSD-FKIP-UAD.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Program Pascasarjana Program Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta (lulus tahun 1990)
2. S1: Jurusan Civics Hukum - Fakultas Keguruan Ilmu Sosial – IKIP Yogyakarta lulus tahun 1976

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI;
2. Buku Teks PPKn SMP;
3. Buku Teks PPKn SMA;
4. Buku Teks PKn SMP Kurikulum 2006;
5. Buku Teks PKn untuk Perguruan Tinggi;
6. Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Profil Editor

Nama Lengkap : Drs. Singgih Prajoga, M.Pd.,
Telp. Kantor/HP : 0213804248/ 08159603995
E-mail : gading55@hotmail.com
Akun Facebook : Singgih Prajoga
Alamat Kantor : Jl. Gunung Sahari Raya 4 Jakarta Pusat
Bidang Keahlian: Bahasa dan Sastra Inggris/Manajemen Pendidikan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1994 – 2010 : Pembantu Pimpinan pada Pusat Perbukuan, Sekretariat Jenderal Kemdikbud.
2. 2010 – sekarang : Pengembang Perbukuan pada Bidang Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Pascasarjana/Manajemen Pendidikan/Universitas Negeri Jakarta (2004-2007)
2. S1: Fakultas Sastra/Bahasa dan Sastra Inggris/Universitas Negeri Jember (1983-1988)

Judul Buku yang Pernah Di*edit* (10 Tahun Terakhir):

1. Bahasa Inggris SMP dan SMA;
2. Bahasa Inggris Buku-Buku Pendidikan;
3. Bahasa Inggris untuk Umum;
4. Bahasa Indonesia SD, SMP, dan SMA.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Lahir di Kediri, 18 Februari 1964. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Saat ini menetap di Jakarta. Pernah mendapatkan pelatihan dan mengikuti beberapa seminar di Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Meksiko, dan India.

HIDUP MENJADI LEBIH INDAH TANPA NARKOBA.